

**PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG  
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA  
PT BANK MALUKU MALUT**

Diajukan Oleh :

**ANA PRATWI**

**45 13 013 134**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM  
MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN  
PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA PT  
BANK MALUKU UTARA

Nama : Ana Pratiwi

Nomor Stambuk : 45 13 013 134

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**DR. Muhktar Sapiri, SE., MM., M.Kes**

**Thanwain, SE., M.Si**

**Mengetahui dan Mengesahkan :**  
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Bosowa Makassar**

**Ketua Program Studi  
Akuntansi**

**Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH**

**Thanwain, SE., M.Si**

**Tanggal Pengesahan : .....**

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana Pratiwi

Nomor Stambuk : 45 13 013 134

Menyatakan bahwa “Skripsi yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar, dengan judul:

**Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Investasi Pada PT Bank Maluku Malut**

Merupakan karya asli, seluruh ide yang ada dalam skripsi ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan diatas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, Juli 2017

Yang menyatakan,



Ana Pratiwi

# **PENGARUH AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT INVESTASI PADA PT BANK MALUKU MALUT**

**Oleh:**

ANA PRATIWI

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi**

**Universitas Bosowa Makassar**

**Dosen Pembimbing:**

Dr. Mukhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes

Thanwain, SE., M.Si

**ABSTRAK**  
**UNIVERSITAS**

**Ana Pratiwi**, 2017. Skripsi. Pengaruh Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Investasi pada PT BANK MALUKU MALUT dibimbing oleh Dr. Mukhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes dan Thanwain, SE., M.Si.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian kredit investasi pada PT Bank Maluku Malut.

Hasil audit yang dilaksanakan pada PT Bank Maluku Malut telah sesuai dengan tahap-tahap audit internal yang terdiri dari perencanaan audit, menguji dan pengevaluasian informasi, Hasil laporan audit, tindak lanjut audit. Bagian pemberian kredit dapat mencapai anggaran kredit yang telah ditetapkan selama 1 (satu) periode bahkan mengalami peningkatan dari 105,95% tahun 2015 menjadi 113,15% ditahun 2016. Berkaitan dengan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian kredit investasi, diharapkan pihak manajemen harus mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi dengan cara manajemen memiliki filosofi dan gaya operasi yang cukup menunjukkan tindakan kreatif dan membuat dokumen pemberian kredit yang telah bernomor urut dan telah tercetak.

**Kata kunci:** Audit Internal, Sistem Pengendalian Intern, Kredit Investasi

**THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN SUPPORTING THE  
EFFECTIVENESS OF INVESTMENT CREDIT CONTROL IN PT BANK  
MALUKU MALUT**

**By:**

*ANA PRATIWI*

**Prodi Accountancy Ekonomi Faculty**

**Bosowa University of Makassar**

**Supervisor:**

*Dr. Mukhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes*

*Thanwain, SE., M.Si*

**ABSTRACT**

**UNIVERSITAS**

*Ana Pratiwi, 2017. The Role of Internal Audit In Supporting The Effectiveness of Investment Credit Control in PT Bank Maluku Malut. Supervised by Dr. Mukhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes and Thanwain, SE., M.Si.*

*The research was conducted in April until June 2017. The purpose of this research is to determine the role of internal audit in supporting the effectiveness of investment credit control at PT Bank Maluku Malut.*

*The results of the audit conducted at PT Bank Maluku Malut have been in accordance with the internal audit stages consisting of audit planning, test and evaluation of information, Audit report results, audit follow-up. Part of lending can reach the credit budget that has been set for 1 (one) period even increased from 105.95% in 2015 to 113.15% in 2016. Related to internal audit in supporting the effectiveness of investment credit control, management is expected to overcome The weaknesses that occur with the way the management has a philosophy and style of operation that simply indicate the creative action and make credit documents that have been serial number and have been printed.*

**Keywords:** *Internal Audit, Internal Control System, Investment Credit*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sebagai wahana untuk melatih diri dan menambah wawasan berfikir. Adapun judul Skripsi ini adalah **“Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Investasi Pada PT Bank Maluku Malut”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak secara langsung maupun tidak langsung berupa materi, pemikiran, motivasi, dukungan serta petunjuk-petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu yang telah berjuang dengan gigih membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta dukungan baik lewat doa'a maupun material. Almarhum Ayah yang telah menanamkan jenak-jenak kehidupan, meskipun tak sempat melihat dan mendampingi saya beranjak dewasa, namun doa selalu terpanjat agar diberikan keluasan alam barzah dan dijauhkan dari azab kubur.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Ir. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. H.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH dan Ibu Dr. Hj. Herminawaty A,SE., MM selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Thanwain, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak DR.Muhktar Sapiri,SE.,MM.,M.Kes selaku pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing serta memberikan saran dan masukan selama pengerjaan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Thanwain, SE., M.Si selaku Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing serta memberikan saran dan masukan selama pengerjaan Skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan memberikan nasehat kepada penulis.
7. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar dan ter-khusus Pak Budi yang telah banyak membantu sehingga urusan administrasi peneliti menjadi lancar.
8. Pimpinan dan Karyawan PT.Bank MalukuMalut tempat penulis melaksanakan penelitian ini. Terima kasih yang tak terhingga atas waktu, data dan penjelasan yang diberikan.

9. Sahabatku FahraWati, Putri Andini, Tutty, Juleilin, sudah bagaikan saudara selalu memberikan bantuan dan masukan yang positif, dan selalu menemani penulis sejak bangku SMA sampai terselesainya penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman lainnya Ira, Nisa, Hijra, Ain, Junita, Novi, Kiki, Eki, Yusni, Athy, Reski, atas kebersamaan, bantuan dan memberikan semangat untuk penulis.
11. Teman-teman dari Jurusan Akuntansi angkatan 2013 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama dalam menempuh pendidikan di kampus.
12. Pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

Akhirnya lewat skripsi ini, penulis ingin memberikan sedikit pengetahuan yang sekiranya dapat memberikan sebuah warna yang baru dalam menjawab tantangan zaman. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya. Dan terakhir, adapun yang telah penulis lalui bukanlah akhir, akan tetapi awal dari munculnya tantangan yang lebih nyata.

Makassar, Juli 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Kerangka Teori .....	6
2.1.1 Audit Internal.....	6
2.1.2 Efektivitas.....	13
2.1.3 Pengendalian Intern.....	13
2.1.4 Pengendalian Intern Bank.....	16
2.1.5 Kredit.....	18
2.1.6 Kredit Investasi.....	32
2.2 Kerangka Pikir .....	35
2.3 Hipotesis.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.2 Jenis Data dan Sumber Data .....	37
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4 Metode Analisis .....	38

3.5 Definisi Operasional .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	40
4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Maluku Malut.....	40
4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Maluku Malut .....	41
4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Maluku Malut.....	43
4.1.4 Aktivitas Usaha Perbankan.....	58
4.1.5 Gambaran Singkat Kredit Investasi .....	62
4.2 Prosedur Pemberian Kredit Investasi dan Penagihannya.....	63
4.2.1 Persiapan dan Pengajuan Kredit.....	63
4.2.2 Pembinaan dan Analisis Kredit .....	65
4.2.3 Keputusan Kredit.....	66
4.2.4 Realisasi dan Administrasi Kredit .....	67
4.2.5 Pembinaan dan Pegawai Kredit.....	68
4.2.6 Tahap Penagihan dan Penyelesaian Kredit.....	68
4.3 Sistem dan prosedur Audit Internal dalam pemberian kredit .....	70
4.4 Prosedur Audit Internal.....	73
4.4.1 Perencanaan Audit.....	73
4.4.2 Tahap Menguji dan Pengervaluasian Informasi .....	81
4.4.3 Laporan Hasil Audit .....	84
4.4.4 Tindak lanjut Hasil Audit.....	86
4.5 Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit.....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan .....	90
5.2 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan .....	43



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Rekapitulasi Kuisisioner .....	77
Tabel 4.2 Rekapitulasi Jawaban Responden.....	80
Tabel 4.3 Selisih Anggaran Dan Realisasi Pemberian Kredit .....	89



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, maka pemerintah mengarahkan khususnya pada bidang ekonomi, dimana pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan di dunia usaha yang dilaksanakan melalui langkah-langkah dan kebijaksanaan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan yang diharapkan. Diantara berbagai kebijakan ekonomi yang dilaksanakan, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah karena bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga bank dituntut peran sertrnya untuk mensukseskan pembangunan melalui jasa kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Pemberian kredit sangat berguna bagi masyarakat karena dapat meningkatkan perekonomian mereka. Di dunia perbankan saat ini dikenal ada tiga jenis kredit, yaitu kredit investasi, modal kerja, dan konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit untuk perorangan yang digunakan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain seperti kredit tanpa agunan. Jenis kredit ini yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya saat ini. Sedangkan kredit modalkerja adalah kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan atau pembelian bahan baku

produksi. Dan kredit investasi adalah kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, dll. Karena digunakan untuk investasi, umumnya kredit investasi ini berjumlah besar.

Pemberian kredit investasi mengandung resiko tertentu, sehingga pihak bank tidak begitu saja memberikannya. Kredit investasi akan diberikan apabila manajemen bank merasa yakin bahwa nasabahnya dapat mengembalikan kredit investasi tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati, baik pokok ataupun bunga pinjaman yang ditetapkan, sehingga bank dapat menghindar diri dari tidak tertagihnya kredit tersebut, yang nantinya akan menimbulkan masalah kredit macet. Kredit macet yang terjadi terutama disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, faktor penguasaan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang masih lemah.

Terjadinya kredit macet dalam jumlah besar akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan pertumbuhan bank tersebut, baik dari segi operasional bank dan dampak psikologis yang akan terjadi di masyarakat. Dengan adanya kasus kredit macet kegiatan operasional bank akan terhambat, hal ini disebabkan oleh keuntungan utama bank yang menurun karena keuntungan utama bank diperoleh dari selisih bunga simpanan masyarakat dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, dampak psikologis yang akan terjadi adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana simpanan mereka di bank tersebut. Sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus kredit macet yang disebabkan karena ketidakmampuan

nasabah dalam memenuhi kewajibannya, maka timbul permasalahan yang tidak diinginkan seperti kekurangan kemampuan masing-masing bank menilai mutu kredit yang telah mereka berikan. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pemberian kredit dari semestinya, bank harus menyusun kebijakan kredit yang komprehensif dan jelas dengan memperhitungkan berbagai macam faktor dan kriteria yang menentukan mutu kebijakan tersebut. Salah satu cara yang dapat membantu perusahaan dalam menilai efisiensi dan efektivitas prosedur pemberian kredit adalah dengan adanya audit internal yang memadai.

Tingkat persaingan antar bank dan risiko pemberian kredit yang tinggi menyebabkan pihak manajemen bank perlu menerapkan suatu pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik perusahaan dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kemacetan kredit, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut akan dapat terhindar dari penyelewengan dan kesalahan yang akan terjadi, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengendalian internal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan internal atau audit internal. Audit internal adalah fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan oleh organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi secara objektif aktivitas-aktivitas organisasi, yang hasil penelitiannya berupa saran, rekomendasi, analisis, dan informasi akan bermanfaat bagi manajemen dalam mengusahakan agar perusahaan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian diperlukan suatu penilaian yang independen dalam perusahaan yang bersangkutan untuk menilai dan mengevaluasi aktivitas pemberian kredit agar pengendalian internal tersebut dapat memadai. Fungsi yang melakukan pengendalian ini dilakukan oleh audit internal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul “ **Peranan Audit Internal dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Investasi pada PT Bank Maluku Maluku**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran audit Internal dalam menunjang efektivitas pengendalian Internal terhadap masalah pemberian kredit investasi PT Bank Maluku Maluku.”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui dan menilai peran audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal terhadap masalah pemberian kredit investasi pada PT Bank Maluku Maluku.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru yang dapat menambah wawasan pembaca mengenai peran audit internal dalam meningkatkan efektivitas pengendalian Internal Pemberian kredit investasi pada bank.



2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang audit internal.
3. Penulis juga mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, pengetahuan, informasi, dan referensi yang berkaitan dengan bidang kredit investasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Audit Internal

###### 1. Pengertian Audit Internal

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan akan tercapai, maka pengendalian secara terus – menerus memerlukan pengawasan dari manajemen. Dengan adanya hal ini maka dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Oleh karena itu manajemen memerlukan bagian khusus untuk melakukan penilaian atas pengendalian internal, bagian ini disebut dengan bagian audit internal, yang dimana harus dilakukan oleh seseorang yang bebas dari pengaruh bagian – bagian yang diperiksanya.

Pengertian audit internal menurut Henri (2013:32) “Audit Internal adalah suatu fungsi peniiaan yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan”.

Menurut Danang Sunyoto (2014:7) “Audit Internal adalah fungsi penilaian yang independen yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai jasa yang diberikan kepada organisasi tersebut.” Definisi audit internal yang dikembangkan dari IIA (*Institute of Internal Auditors*), yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di Indonesia, yaitu sebagai suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen

dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasional perusahaan.

## 2. Fungsi Audit Internal

Dalam Standar Profesional Audit Internal, disebutkan bahwa fungsi pemeriksaan intern adalah untuk meyakinkan :

### a. Keandalan Informasi

Pemeriksa internal harus meninjau keandalan (reliabilitas dan integritas) berbagai informasi finansial dan pelaksanaan pekerjaan atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi.

### b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, Rencana, Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan.

Pemeriksa internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki. Jadi, pemeriksa intern bertanggung jawab dalam menentukan apakah sistem tersebut telah mencukupi dan efektif serta apakah berbagai kegiatan yang diperiksa benar-benar telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

### c. Perlindungan terhadap Harta

Pemeriksa internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi harta terhadap berbagai jenis kerugian seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal atau tidak pantas dan, bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva. Pada

saat memverifikasi keberadaan suatu harta, pemeriksa harus mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

d. Penggunaan Sumber Daya secara Ekonomis dan Efisien

Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan seperti fasilitas-fasilitas yang tidak dipergunakan sepenuhnya, pekerjaan yang tidak produktif, berbagai prosedur yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan biaya dan terlalu banyak atau sedikitnya jumlah staf.

e. Pencapaian Tujuan

Pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasin, atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi, atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

**3. Tujuan dan Ruang Lingkup**

Tujuan pemeriksaan intern adalah untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan/hal-hal yang diperiksa. Untuk mencapai keseluruhan tujuan ini, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
- b. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.

- c. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
- d. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan..
- e. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan.

Aktivitas audit internal pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam dua macam bentuk sebagai berikut:

a. *Financial Auditing*

Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Tugas-tugas ini dapat dilaksanakan tanpa suatu evaluasi yang memerlukan penelitian lebih mendalam dan hasil audit ini diukur dengan tolak ukur yang mudah, yaitu “benar” atau “salah”. Dengan kata lain, audit keuangan berusaha untuk memverifikasi adanya harta dan untuk memperoleh kepastian bahwa terhadap harta itu telah diadakan pengamanan yang tepat. Di samping itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa keserasian dari sistem pembukuan serta pembuatan laporan akan diperiksa dalam *financial auditing* ini.

b. *Operasional Auditing*

Kegiatan pemeriksaan lebih ditujukan pada bidang operasional untuk dapat memberikan rekomendasi berupa perbaikan dalam cara kerja, sistem pengendalian, dan sebagainya. Pada perkembangan fungsi audit internal saat ini, auditor internal seperti ini sedikit mengurangi kegiatan pemeriksaan dalam bidang

keuangan, dan lebih banyak perhatiannya diberikan pada kegiatan pemeriksaan operasional. Namun, intinya adalah bahwa pemeriksaan operasional ini meliputi perluasan dari pemeriksaan intern pada semua operasi perusahaan, dan tidak membatasi diri pada bidang keuangan dan akuntansi semata, oleh karena aktivitas keuangan dan akuntansi berhubungan erat dengan hampir semua aktivitas yang berlangsung dalam perusahaan.

Ruang lingkup audit internal mencakup pekerjaan audit apa saja yang harus dilakukan, oleh karena itu biasanya manajemen dan direksi memberikan pengarahan secara umum mengenai ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan diaudit.

#### **4. Wewenang dan Tanggung Jawab Audit Internal**

Perincian wewenang dan tanggung jawab pemeriksa hendaknya dibuat secara hati-hati dan mencakup semua wewenang yang diperlukan serta tidak mencantumkan tanggung jawab yang tidak akan dipikulnya. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor internal tersebut untuk berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi. Auditor internal harus bebas dalam mereview dan menilai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan catatan.

Menurut Holmes yang dikutip dalam Kumpulan Referensi Ilmu Akuntansi ([Http://referensiakuntansi.blogspot.co.id](http://referensiakuntansi.blogspot.co.id)), menguraikan dan menilai tanggung jawab auditor internal sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi dan nasihat kepada manajemen dan menjalankantanggung jawab ini dengan cara konsisten dengan kode etik *Institute of Internal Auditor*.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapaisasaran audit dan sasaran perusahaan.

Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal tidak memikul tanggungjawab langsung dan juga tidak mempunyai wewenang atas kegiatan-kegiatan yang sedang diperiksa itu. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penilaian auditor internal tidak membebaskan orang lain dalam perusahaan itu dari tanggungjawab. Dengan kata lain, auditor internal harus bebas membahas dan menilai kebijaksanaan, rencana, prosedur dan pencatatan yang ada, tetapi tidak berarti auditor internal menggantikan tugas pejabat yang diperiksanya tersebut.

Tanggung jawab seorang audit internal menurut Komite SPAP Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2011:322.1) yaitu:

Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan bagian komisararis atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut auditor intern mempertahankan obyektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya.

Wewenang yang dapat ditetapkan bagi auditor internal adalah menyusun program audit internal secara menyeluruh atau semua aktivitas dalam perusahaan. Selain itu, menguji keandalan pengendalian manajemen, serta tanpa batasan untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan, pelaporan serta harta milik perusahaan juga termasuk dalam wewenang seorang auditor internal.

## 5. Program Audit Internal

Program audit internal merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Selain itu berfungsi sebagai alat perencanaan yang juga penting untuk mengatur pembagian kerja. Memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan (Yan Achmad, 2012). Dalam program audit haruslah:

- a. Membuktikan prosedur audit dalam pengumpulan, analisis, penafsiran dan penyimpangan informasi yang diperoleh selama audit
- b. Menetapkan tujuan audit
- c. Menyatakan lingkup dan tingkat pengujian yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit
- d. Mengidentifikasi aspek-aspek teknis, resiko, proses dan transaksi yang akan diteliti
- e. Menetapkan sifat, luas pengujian yang diperlukan
- f. Merupakan persiapan bagi awal pelaksanaan pekerjaan.

## 6. Tahap-tahap Audit Internal

Tahap-tahap pelaksanaan audit internal menurut *Standars for the Profesional of Internal Auditing* dalam Mariani (2012) meliputi :

- a. Perencanaan Audit
 

Auditor Internal harus merencanakan setiap pemeriksaan, dalam hal ini perencanaan tersebut harus didokumentasikan yang meliputi:

  1. Penetapan tujuan, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan.
  2. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diperiksa.
  3. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
  4. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
  5. Melaksanakan survai secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai alasan dan saran-saran dari pihak yang akan diperiksa.
  6. Pembuatan program pemeriksaan.



7. Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan.
  8. Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan.
- b. Pengujian dan Pengevaluasi Informasi  
Audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.
  - c. Pemberitahuan Hasil  
Auditor harus melaporkan hasil audit yang dilakukannya setelah audit selesai dilaksanakan. Suatu laporan harus obyektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan pemeriksaan, bila dipandang perlu dapat pula dicantumkan pernyataan tentang pendapat pemeriksa.
  - d. Tindak Lanjut (*Follow Up*)  
Auditor internal harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

### 2.1.2 Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju (Susan Dwi Anggriani : 2014). Menurut Yonas Muanley (2016), "Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan."

### 2.1.3 Pengendalian Intern

#### 1. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut COSO yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2013:3) mendefinisikan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

*Internal Control: a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*

- a. *Effectiveness and efficiency of operations,*
- b. *Reliability of financial reporting,*
- c. *Compliance with applicable laws and regulations.*

Yang dapat diartikan bahwa pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh aturan direksi, manajemen, personalia lainnya yang disusun untuk memberi jaminan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan berikut ini :

- a. Efektivitas dan efisiensi kegiatan
- b. Dapat dipercayanya laporan keuangan
- c. Kesesuaian dengan undang-undang yang ditetapkan dan aturan

Menurut Sekar Mayangsari dan Puspa Wandanarum (2013:59)

“Pengendalian Internal adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai.”

## 2. Tujuan Pengendalian Internal

Sesuai dengan *Standard for The Professional Practice of Internal Auditng* (Standard 300). *Scope of Work*, 5 tujuan utama pengendalian intern adalah untuk menyakinkan:

- a. Keandalan dan integritas informasi
- b. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan
- c. Mengamankan aktiva
- d. Pemakaian sumberdaya yang ekonomis dan efisien
- e. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan.

Kelima tujuan pengendalian tersebut merupakan hasil (output) suatu pengendalian intern yang memadai, tetapi pengendalian intern yang bagaimana baiknya tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan

bahwa data yang dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut.

### 3. Unsur-unsur Pengendalian Internal

Komponen-komponen yang terdapat di dalam pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh Sekar Mayangsari dan Puspa Wandanarum (2013:59) adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian, Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal ini mencakup: etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi, juga tercakup struktur organisasi serta kebijakan dan filosofi manajemen.
- b. Penentuan Risiko, Komponen ini telah menjadi bagian dari aktivitas audit internal yang terus berkembang. Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. COSO juga menambahkan pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis.
- c. Aktivitas Pengendalian, Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan dengan konsep kontrol internal. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan pemisahan tugas dan pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur, auditing internal dan audit internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi risikonya untuk organisasi secara keseluruhan.
- d. Informasi dan komunikasi, Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manajemen. Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi tentang operasi kontrol internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas kontrol dan untuk mengelola operasinya.
- e. Pengawasan, Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen kontrol.

### 4. Keterbatasan Pengendalian Intern

Keterbatasan yang melekat pada pengendalian intern menurut Danang Sunyoto (2014:159) adalah ssebagai berikut:

- a. Kesalahan dalam pertimbangan, sering kali terjadi manajemen dan personel lainnya melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis, atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya.
- b. Kemacetan, Kemacetan dalam pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas salah mengerti dengan instruksi, atau melakukan kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perpindahan personel

sementara atau tetap, atau perubahan sistem atau prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan.

- c. Kolusi, Kolusi atau persengkongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan pegawai lainnya, atau dengan pelanggan atau pemasok bisa tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian internal.
- d. Pelanggaran oleh manajemen, Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-prosedur untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi, atau membuat laporan keuangan menjadi tampak baik. Praktik pelanggaran oleh manajemen meliputi pula pemberian informasi yang tidak benar secara sengaja kepada auditor atau pihak lain.
- e. Biaya dan manfaat, Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya mungkin tidak dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian intern.

#### 2.1.4 Pengendalian Intern Bank

##### 1. Pengertian Pengendalian Intern Bank

Menurut Rizky Ramadhani (2016:20) pengertian pengendalian Intern bank adalah sebagai berikut :

suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (*on going basis*), untuk:

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya

##### 2. Faktor Pertimbangan dalam Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Bank

Bank harus memiliki sistem pengendalian intern yang dapat diterapkan secara efektif, dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Total asset
- b. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk produk dan jasa baru
- c. Kompleksitas operasional, termasuk jaringan kantor
- d. Profil risiko dari setiap kegiatan usaha
- e. Metode yang digunakan untuk pengolahan data dan teknologi informasi

- f. serta metodologi yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan, dan pembatasan risiko
- g. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Elemen Utama Sistem Pengendalian Intern Bank

Pengendalian intern bank terdiri dari lima elemen utama yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian
- b. Identifikasi dan Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
- d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi
- e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

### 4. Indikator Keberhasilan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam Perbankan

Menurut Tawaf dalam Rizky Ramadhani (2016:21) sebagai indikasi dari keberhasilan pelaksanaan pengendalian bisa dilihat antara lain:

- a. Menurunnya angka pengaduan atau keluhan nasabah
- b. Menurunnya angka penyelewengan dan kebocoran
- c. Berkurangnya kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan pekerjaan
- d. Berkurangnya frekuensi audit khusus pada umumnya ataupun berkurangnya kasus-kasus khusus
- e. Meningkatnya keterampilan pegawai bank dalam pelaksanaan pekerjaan
- f. Meningkatnya efisiensi pelayanan bank
- g. Meningkatnya disiplin kerja pegawai yang diimbangi pula dengan meningkatnya kegairahan, prestasi, dan produktivitas kerjanya
- h. Dan akhirnya, meningkatnya kesehatan bank secara keseluruhan.

### 5. Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang

telah disetujui kedua belah pihak. Pengendalian intern kredit penting, karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan system pengendalian intern kredit yang baik dan benar (David Iskandar, 2012).

David Iskandar (2012) menyebutkan tujuan pengendalian Intern Kredit adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi persentase collectibility credit yang disalurkan bank
- g. Meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit bank

## 2.1.5 Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Menurut Raymong P. Kent (1972) dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa: “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.”

Pengertian pinjaman (kredit) menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 yang dikutip oleh Irham Fahmi (2014:90) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

## 2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2014:166) adalah sebagai berikut:

- a. Mencari Keuntungan, Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.
- b. Membantu usaha nasabah, Tujuan lain dari pemberian kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu Pemerintah, Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi secara luas di antaranya adalah:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Sebagai alat stabilitas ekonomi
- e. Untuk meningkatkan semangat usaha
- f. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Untuk meningkatkan hubungan internasional

## 3. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2015:84) adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan, Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk

mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

- b. Kesepakatan, kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.
- c. Jangka waktu, Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Risiko, faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti, bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.
- e. Balas jasa, akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisis dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### 4. Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

##### a. Dilihat dari segi kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

1. Kredit Investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa



pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2. Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut.

1. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.
2. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
3. Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah sebagai berikut.

1. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu berkisar satu tahun sampai tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.
3. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

d. Dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut.

1. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

e. Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang
2. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi
3. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
4. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
5. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

6. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

## 5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Penilaian kredit oleh bank dilakukan untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Adapun bentuk penilaian pemberian kredit secara umum dilakukan dengan analisa 5C berikut ini:

- a. *Character*, merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kematian membayat.
- b. *Capacity*, untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi) dengan melakukan pengukuran

seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

- d. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- e. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan dengan analisis penilai 7P kredit adalah sebagai berikut:

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
- b. *Party*, yaitu mengklarifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat

bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.

- d. *Prospek*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan, tetapi juga nasabah.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang terwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

Prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai berikut.

1. Aspek Hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atas surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.
3. Aspek Keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuancalon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya.
4. Aspek Operasi/Teknis, merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
5. Aspek Manajemen, merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.
6. Aspek ekonomi/Sosial, merupakan aspek yang menilai dampak ekonomi dan sosial yang akan ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.
7. Aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

## 6. Prosedur Audit Perkreditan

Salah satu tujuan dari audit bidang perkreditan yaitu, mengurangi terjadinya kegagalan/debitur macet yang akan menjadi pukulan berat bagi bank yang bersangkutan. Berbagai sebab kegagalan perkreditan tersebut selain

diakibatkan factor-factor external/makro ekonomis, juga diakibatkan factor-facot intern bank itu sendiri. Oleh karena itu dalam melaksanakan auditnya, auditor juga harus memusatkan perhatiannyakegagalan/kemacetan kredit yang mungkin akan menimpa bank yang bersangkutan. Sebab-sebab kegagalan perkreditan antara lain :

1. Adanya *Self Dealing*, yaitu adanya *Vested Interst* (kepentingan pribadi) dari para eksekutif bank dalam memutuskan kreditnya sehigga tidak obyektif lagi dalam melanggar prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. *Self dealing* inierat hubungannya dengan masalah mental yang kurang baik dari pejabat Kredit Bank.
2. Tidak terdapatnya kebijaksanaan-kebijaksanaan kredit yang sehat (*Non Exisistence of Sound Lending Policies*), yaitu ketidakadaan perencanaan kredit maupun ketidakadaan pedoman dalam pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan yang sehat serta tidak adanya pedoman atau dasar/teknik dalam pemutusan pemberian kredit oleh suatu bank kepada para nasabahnya.
3. *Incompkete Credit Information*, yaitu jeleknya *management information system*, baik dari lingkungan bank itu sendiri maupun informasi-informasi yang menyangkut kegiatan usaha nasabah yang bersangkutan.
4. *Failure of Obtain of Enforce*, yaitu ketidak mampuan untuk memperoleh atau mengambil tindakan likuidasi sesuai isi perjanjian kredit yang disebabkan mungkin posisi yudiris bank yang tidak menguntungkan, tidak lengkapnya dokumen-dokumen yang menyangkut legalitas nasabah dan seterusnya.



5. *Technical Incompetency*, yaitu kurangnya kemampuan teknis para pejabat kredit dalam menganalisa permohonan kredit sehingga menghasilkan keputusan – keputusan yang salah, begitu juga kurangnya kemampuan teknis para pengelola kredit hingga mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan kredit.
6. *Poor Selection of Risk*, yaitu ketidakmampuan eksekutif kredit dari bank yang bersangkutan dalam melakukan seleksi rasio dalam pemberian kredit kepada para nasabahnya.
7. *Overfinancing Underfinancing*, yaitu ketidakmampuan pengelola kredit dalam memberikan kredit dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan, baik ditinjau dari timingnya, mungkin pemberian kredit terlalu lambat ataupun juga terlalu cepat.
8. *Lack of Supervising*, banyak pinjaman yang cukup sehat pada saat kredit diberikan tetapi karena tidak adanya pengawasan yang efektif, maka kredit-kredit tersebut menjurus kearah kredit macet dan lain-lain.

Di dalam upaya menekan atau menghindari sejak awal kegagalan di dalam pemberian kredit, maka Bank Indonesia pada tanggal 31 Juli 1995 telah mengeluarkan SE No.27/7/UPDB yang menetapkan tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank pada setiap bank umum. Ada enam hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) tersebut yaitu:

a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.

Untuk menghindari kegagalan dalam pemberian kredit maka dalam pemberian kredit tersebut setiap bank wajib memiliki pokok-pokok peraturan mengenai tata cara pemberian kredit yang sehat, pokok-pokok pengaturan pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur besar tertentu, kredit yang mengandung risiko yang tinggi serta kredit yang perlu dihindari, untuk memantau kualitas kredit yang diberikan tersebut, bank juga diharuskan melakukan penilaian kolektabilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Organisasi dalam manajemen perkreditan.

Untuk lebih mendukung pemberian kredit yang sehat dan telah mengandung unsure pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan, maka setiap bank juga wajib memiliki Komite Kebijakan Perkreditan (*credit policy committee*) dan komite ini mempunyai tugas membantu direksi bank dalam merumuskan kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbankan.

c. Kebijakan persetujuan kredit

Persetujuan pemberian kredit merupakan langkah yang kritis dalam proses perkreditan oleh karena itu bank diwajibkan memiliki kebijaksanaan persetujuan kredit yang sekurang-kurangnya mencakup konsep hubungan total permohonan kredit (*Total Credit Relationship Concept*), penetapan batas

wewenang kredit, tanggungjawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan proses persetujuan pencairan kredit.

d. Dokumentasi dan administrasi kredit

Bank harus menetapkan jenis-jenis dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis kredit yang diberikan, serta harus memastikan keabsahan dan legalitas setiap dokumen kredit yang diterbitkan oleh bank maupun yang diterima dari nasabah. Selanjutnya dokumen kredit tersebut harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen kredit dari tempat penyimpanan harus mengandung unsur pengamanan ganda.

e. Pengawasan kredit

Meningat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat merugikan bank yang pada gilirannya dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan, maka setiap bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang menyeluruh. Setiap bank harus mempunyai struktur pengendalian intern yang memadai dalam perkreditan yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat.

f. Penyelesaian kredit bermasalah

Didalam proses perkreditan bank akan selalu dihadapkan pada risiko timbulnya kredit bermasalah yang selalu harus diwaspadai dan sedapat mungkin dapat dicegah. Dalam upaya untuk meningkatkan pemantauan secara

dini terhadap kredit-kredit yang akan atau di duga akan merugikan bank, maka bank wajib melakukan pengawasan secara khusus dan secara berkala wajib melakukan evaluasi terhadap daftar kredit dalam pengawasan khusus tersebut serta hasil penyelesaiannya. Apabila jumlah seluruh kredit yang kolektabilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai 7,5% atau kriteria lain yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank wajib untuk:

1. Melaporkan kredit bermasalah ke Bank Indonesia
2. Membentuk program penyelesaian kredit bermasalah
3. Melaksanakan program penyelesaian kredit bermasalah
4. Melakukan evaluasi efektivitas program penyesuaian kredit bermasalah

Jadi jika diteliti lebih mendalam, sebab-sebab kegagalan kredit di atasterlihat terutama disebabkan karena lemahnya pengendalian intern. Oleh karena itu dalam audit ini auditor bank perlu memberikan perhatian yang besar pada penilaian pengendalian intern bidang perkreditan, apakah sudah memadai atau belum.

### **2.1.6 Kredit Investasi**

Menurut Kasmir (2015:86) “Kredit Investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.”

Ciri-ciri investasi adalah :

1. Digunakan untuk penanaman modal

2. Mempunyai perencanaan yang terarah
3. Waktu penyelesaian kredit jangka menengah dan panjang.

Sehubungan dengan ciri-ciri diatas, maka pada umumnya kredit investasi ini berjumlah relatif besar dengan jangka waktu yang relatif lebih lama daripada kredit lainnya. Hal ini akan menyebabkan risiko tertentu pada pihak bank yang bersangkutan. Untuk menghindari atau memperkecil risiko atas pemberian kredit investasi ini maka bank harus menetapkan suatu prosedur tertentu dalam memberikan kredit.

Kredit investasi diberikan oleh bank dengan tujuan membantu para investor untuk mendanai pembangunan proyek baru atau perluasan proyek yang sudah ada. Kredit investasi diberikan dalam jangka menengah atau panjang, antara lima sampai sepuluh tahun. Jangka waktu tersebut disesuaikan dengan tujuan penggunaan kredit, yaitu untuk pengadaan harta tetap perusahaan, yang oleh investornya tidak akan diuangkan kembali dalam jangka pendek.

Pembayaran kembali kredit investasi dilakukan dengan cara mengangsur. Jadwal pembayaran angsuran dapat berbeda-beda, dimulai dari bulanan, enam bulanan, sampai dengan tahunan.

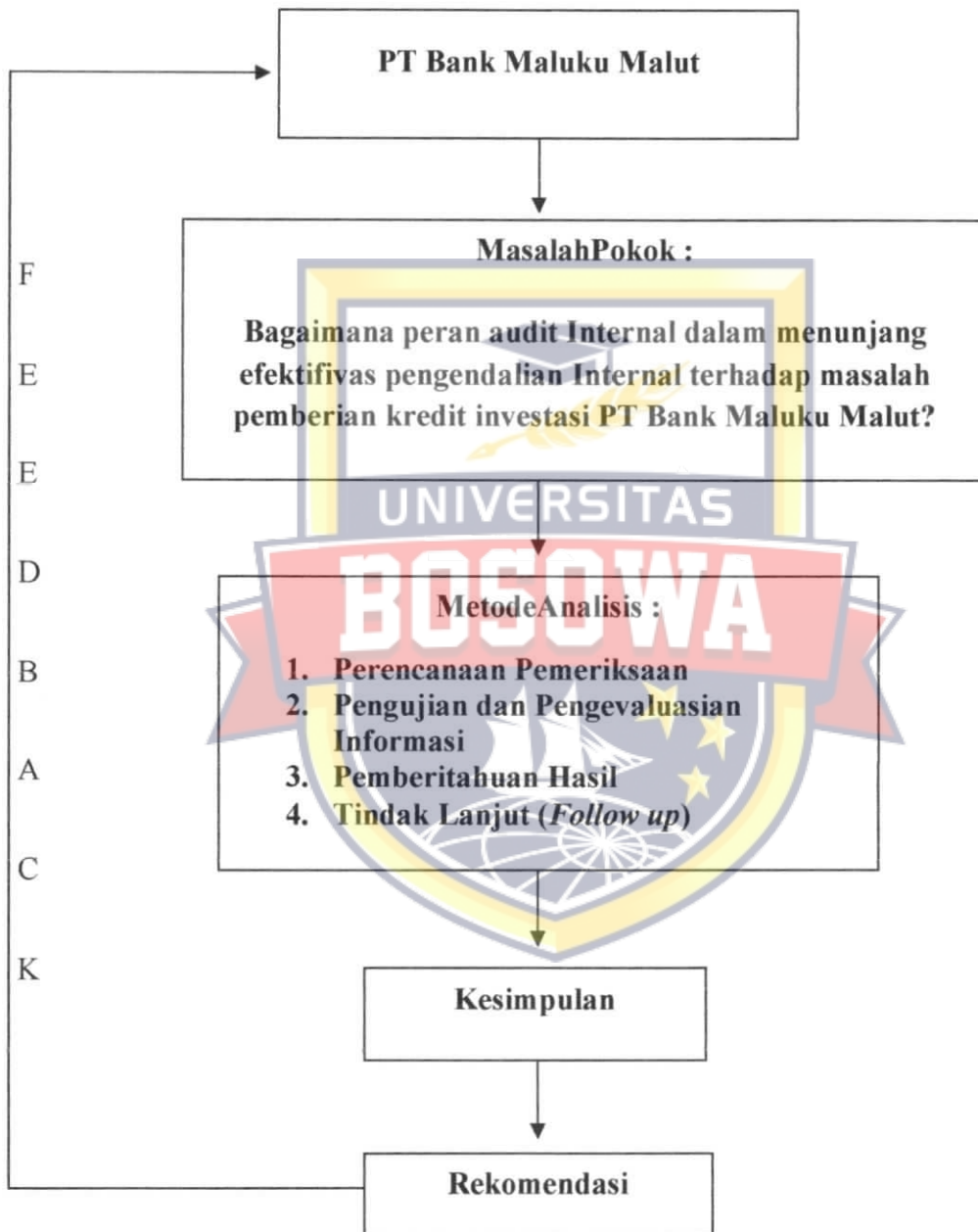
Jumlah kredit investasi yang dibutuhkan oleh investor berbeda-beda. Bisadimengerti bahwa semakin besar jumlah kredit investasi yang diberikan bank, akan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Namun, bila sebelum pemberian kredit investasi ini telah dianalisa secara profesional dan kemudian setelah proyek beroperasi dimonitor dengan baik, kredit investasi dapat menjadialah satu sumber penghasilan yang menguntungkan bagi bank.

Sebelum memutuskan untuk meluluskan permintaan kredit investasi, bank akan meneliti tiga hal yaitu faktor intern bank, kredibilitas investor, dan prospek masa depan proyek yang akan dibangun. Kredibilitas investor dan tim manajemen mereka menjadi sangat penting berperan dalam kasus analisis kredit investasi.



## 2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1  
Kerangka Pikir



### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang dikemukakan sebelumnya, maka Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga “Peranan Audit Internal belum mengikuti tahap-tahap audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit investasi pada PT Bank Maluku Malut.”





## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Maluku Malut yang berlokasi jl. Kemerdekaan kota Ternate. Waktu penelitian dilaksanakan ± Tiga bulan yaitu bulan April sampai Juli 2017.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan yang berupa dokumen, penjelasan dan keterangan-keterangan. Data kualitatif meliputi sejarah pendirian perusahaan, lokasi perusahaan, bidang usaha perusahaan, struktur organisasi, prosedur pelaksanaan audit internal dalam kredit investasi.

##### 3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pemberian kuesioner, dan hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang relevan dalam penulisan ini, metode pengumpulan data dan pengolahan data yang digunakan adalah:

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian ini.
2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung terhadap responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
3. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai masalah yang akan diteliti.
4. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung catatan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.
5. Kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang mendukung penelitian ini. Penggunaan dokumen teknik ini sebagai bahan acuan dan pedoman, serta dimaksudkan untuk menemukan data-data yang dapat dijadikan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.4 Metode Analisis

Untuk menguji dan membuktikan kebenaran hipotesis yang telah diajukan, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahap-tahap audit internal sebagai berikut:

1. Perencanaan Audit

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
3. Laporan Hasil Audit
4. Tindak Lanjut (Follow Up)

### 3.5 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.
2. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
3. Pengendalian Internal adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai.
4. Kredit Investasi merupakan kredit dari bank untuk keperluan menambah modal guna mengadakan perluasan usaha, rehabilitasi, serta menjalankan suatu proyek baru.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Perusahaan

##### 4.1.1 Sejarah Singkat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut

Bank Maluku didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1961 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Maluku, berdasarkan Akte Notaris Mr. Chr. Soplanit No. 01. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha Bank Pembangunan Daerah Maluku diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Maluku Nomor 1/DPRD-GR/1966 tanggal 01 Maret 1966 dengan modal dasar sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku No. 05 Tahun 1990, jumlah dasar Bank Pembangunan Daerah Maluku diubah menjadi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Bank Pembangunan Daerah, maka dilakukan penyesuaian dan penggantian atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku No.1/DPRGR/1996 tanggal 1 Maret 1966 dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku No. 03 tanggal 7 Juli 1987.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I

Maluku No.03 tanggal 7 Juli 1987 dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku No. 01 tanggal 20 Februari 1993.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 02 Tahun 1999, tanggal 25 Mei 1999 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.71.719 tanggal 29 Juni 1999, bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai Akte Pendirian Notaris Abua Tuasikal, SH Nomor 27 Tahun 1999 tanggal 19 Juli 1999, yang mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C 18886 HT.01.01 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 24 Desember 1999 dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus limapuluh milyar rupiah).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dilakukan perubahan atas anggaran dasar perseroan guna menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 berdasarkan Akte Notaris Grace Margareth Goenawan, SH No. 87 tanggal 29 September 2008 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-12672.AH.01.02 tanggal 14 April 2009.

#### **4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut**

##### **1. Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut**

*The realization of the developing Bank in a natural manner, had a predicate very good, independent, professional as well as the added value creation for the*

*growth of the community's economics* (Terwujudnya Bank berkembang secara wajar, berpredikat sangat baik, mandiri, profesional serta terciptanya nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat).

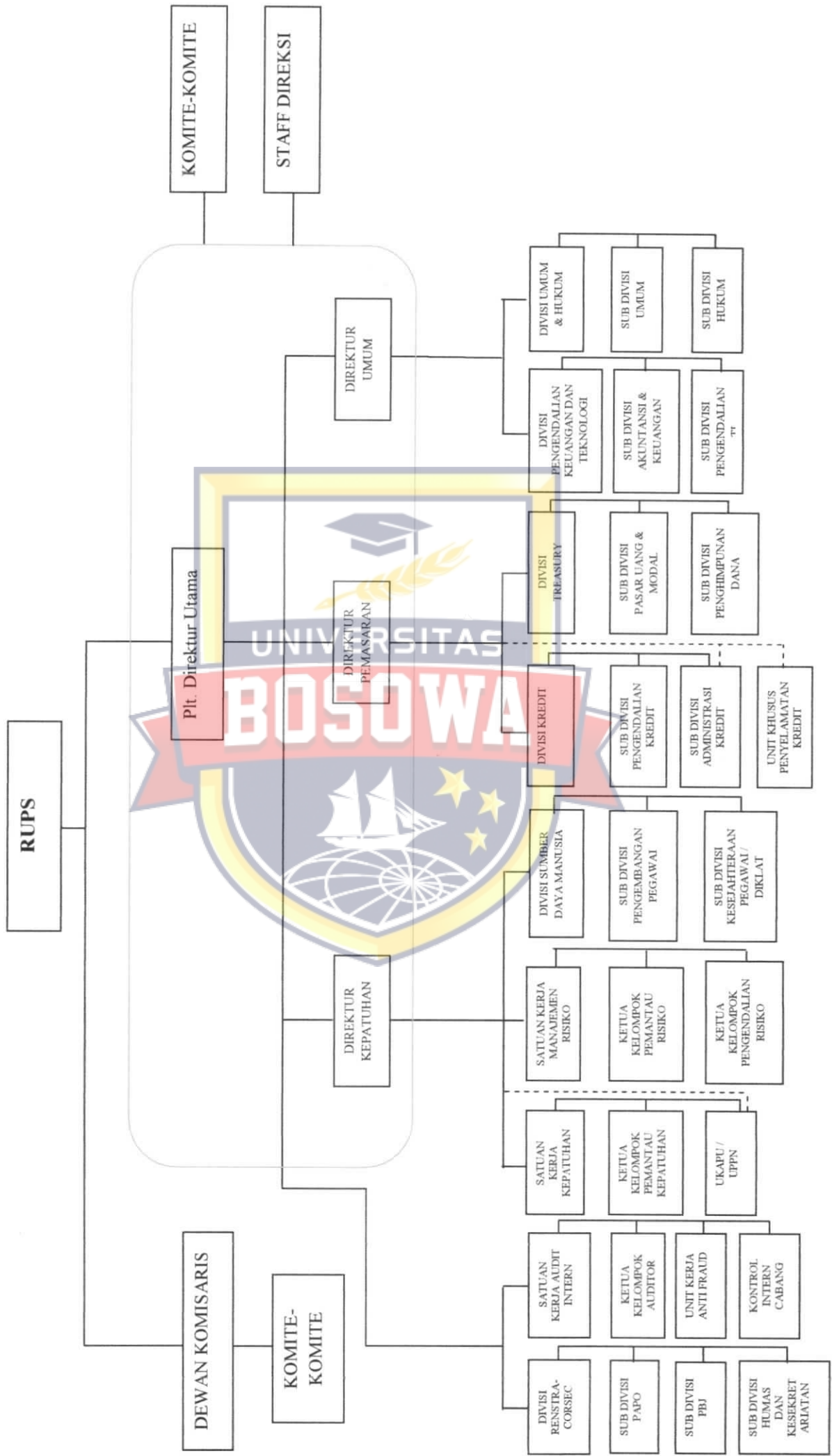
## 2. **Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut**

*Encouraged and developed the growth of the economy of the region as well as one of the sources of the original income of the region* (Mendorong dan mengembangkan laju perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah).



Gambar 4.1

STUKTUR ORGANISASI PT. Bank Maluku Utara



**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi SKAI**





### **Job Description PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut**

PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut menerapkan struktur organisasi dengan sistem organisasi fungsional, dimana setiap bagian memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan.

#### **1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)**

Adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang dan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam melaksanakan wewenangnya, RUPS harus berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Dalam melaksanakan wewenangnya, RUPS juga harus memperhatikan kepentingan pengembangan dan kesehatan Perseroan, kepentingan *stakeholders* serta hak-hak Perseroan.

#### **2. Dewan Komisaris**

Adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi. Selanjutnya dalam ketentuan lain ditetapkan bahwa komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi. Fungsi-fungsi pokok pokok Komisaris Utama adalah mengevaluasi kegiatan usaha Bank yang dijalankan oleh Direksi dan Komisaris, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Resiko (Resiko Kredit, Resiko Pasar, Resiko Likuiditas, Resiko Operasional, Resiko Hukum, Resiko Reputasi) yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi

dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Resiko tersebut yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan, mengevaluasi dan memutuskan suatu permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Adapun fungsi-fungsi pokok yang dilakukan oleh Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Direktorat Kredit

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap kebijakan dan strategi pengkreditan Perseron.
2. Memutuskan pengajuan permohonan kredit di atas BWMK (Batas Wewenang Memutus Kredit) Direksi dengan memberikan persetujuan dan atau penolakan atas proposal kredit yang diajukan.
3. Memonitor dan serta mengevaluasi perkembangan pengkreditan berdasarkan laporan-laporan yang diberikan secara berkala dari Direktorat Kredit, maupun yang disampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk pembahasan pengkreditan.

b. Direktur Operasional

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap kebijakan karyawan.

2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap teknologi dan sistem informasi bank.
3. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala terhadap kebijakan dan strategi operasional Perseroan.

### 3. Direksi

Adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Selanjutnya pada ketentuan lain ditetapkan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi terdiri dari:

#### a. Direktur Utama

Direktur utama melakukan koordinasi yang bersifat umum atau horizontal untuk tingkat direksi. Fungsi-fungsi pokok Direktur Utama adalah merumuskan arah dan tujuan strategis perusahaan jangka panjang, bersama-sama dengan Wakil Direktur Utama yang membawahi beberapa Direktorat mengarahkan, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja masing-masing Direktorat, memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas guna mencapai tujuan perusahaan dan secara berkala mengadakan penilaian atas kemajuan dari masing-masing unit usaha demi tercapainya tujuan perusahaan.

b. Direktur Umum

Direktur umum melakukan koordinasi yang bersifat umum atau horisontal untuk tingkat Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi Sumber Daya Manusia, dan Kesekretariatan dan Umum. Fungsi-fungsi pokok Direktur Umum adalah mengarahkan, mengevaluasi, menyetujui kebijakan dan rencana kerja dari unit kerja yang berada di bawahnya, pencatatan dan pemeliharaan seluruh asset yang dimiliki perusahaan berikut pengurusan asuransinya, memastikan bahwa kelancaran sistem telekomunikasi, listrik, keamanan kantor, penyediaan barang, aktiva tetap dan transportasi telah dijalankansesuai dengan prosedur yang berlaku.

c. Direktur Kepatuhan

Direktur kepatuhan melakukan koordinasi yang bersifat umum atau horisontal untuk tingkat Divisi perencanaan dan pengembangan, satuan kerja manajemen resiko, dan satuan kerja kepatuhan. Fungsi-fungsi pokok Direktur Kepatuhan adalah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas poin sebelumnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dean Komisaris.

#### d. Direktur Pemasaran

Direktur pemasaran melakukan koordinasi yang bersifat umum atau horisontal untuk tingkat Divisi *Treasury*, Kredit, dan Penyelamatan Kredit. Fungsi-fungsi pokok Direktur Pemasaran adalah bersama dengan Dewan Direksi bertanggung jawab atas hasil usaha perseroan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham atau Dewan Komisaris termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan penerapan kebijakan strategi pengelolaan perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, bertanggung jawab atas pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkungan Direktorat Kredit dan Direktorat *Treasury*.

#### 4. Komite-komite

Komite-komite adalah suatu panitia di bawah penyeliaan atau dipimpin oleh Direksi atau Direktur Sektor untuk menyusun atau menentukan kebijaksanaan dan strategi guna pencapaian sasaran atau tujuan perusahaan.

#### 5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI berperan sebagai pengawas intern yang mengawasi keseluruhan penyelenggaraan administrasi keuangan dan kegiatan bank serta mengungkapkan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Bank.

#### 6. Divisi Penelitian dan Pengembangan

Divisi penelitian dan pengembangan memiliki dua sub divisi yang terdiri dari:

##### a. Sub Divisi Penelitian dan Pengembangan

Sub divisi penelitian dan pengembangan memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu menyusun konsep kebijaksanaan umum bidang penelitian dan pengembangan, menyusun rencana kerja dan anggaran bidang penelitian dan pengembangan, melakukan analisis lingkungan untuk perencanaan dan pengembangan operasional.

b. Sub Divisi Perencanaan dan Organisasi

Sub divisi perencanaan dan organisasi memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu menyusun konsep kebijaksanaan umum bidang perencanaan organisasi, menyusun rencana kerja dan anggaran bidang perencanaan dan organisasi, bersama Komite Perencanaan dan Anggaran mengalokasikan anggaran yang telah disetujui Direksi kepada masing-masing unit operasional.

7. Satuan Kerja Manajemen Resiko

Satuan Kerja Manajemen Resiko terdiri dari Kelompok Pemantau dan Pengendali Resiko dengan fungsi-fungsi pokok adalah mengidentifikasi jenis resiko kredit, menetapkan metode pengukuran resiko kredit, melakukan perhitungan resiko kredit, menetapkan kredit eksposur dan melakukan pemantauan limit kredit, mengidentifikasi jenis resiko non kredit (resiko pasar, likuiditas, operasional Bank), menetapkan metode pengukuran, melakukan perhitungan resiko non kredit serta memantau pelaksanaannya, menyiapkan strategi pengendalian resiko kredit dan non kredit.

## 8. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan terdiri dari Kelompok Pemantau Kepatuhan yang memiliki fungsi pokok adalah memantau pelaksanaan Standard Operation Procedure (SOP) oleh kantor pusat maupun kantor cabang, melakukan pengkajian, penyesuaian, dan penyempurnaan atas Standard Operation Procedure (SOP) yang digunakan, *memantau kegiatan operasional Bank agar tidak menyimpang dari peraturan atau ketentuan yang berlaku, baik ketentuan intern maupun ekstern Bank, memantau kebijakan Direksi agar tidak menyimpang dari SISDUR yang berlaku, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai profil resiko Bank kepada Direktur Utama melalui Direktur Kepatuhan dan kepada KOMENKO serta Bank Indonesia.*

## 9. Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi

Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi terdiri dari dua Sub Divisi, yaitu:

### a. Sub Divisi Akuntansi

Sub divisi akuntansi memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu menyusun konsep Rencana Bisnis (*Bussines Plan*) serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi Akuntansi, merumuskan dan menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan menjabarkan menjadi rincian tugas untuk unit organisasi sesuai dengan bidangnya, menyelenggarakan administrasi akuntansi dan keuangan kantor pusat dengan menghimpun serta mengolah data semua transaksi keuangan dari unit-unit operasional.

b. Sub Divisi Pengembangan Teknologi Informasi

Sub divisi pengembangan teknologi informasi memiliki fungsi pokok yaitu menyusun konsep Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi Pengembangan Teknologi Informasi, merumuskan dan menyusun seluruh program aplikasi agar tetap bisa digunakan sesuai dengan sistem operasi yang ada, melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan komputerisasi kantor pusat dan unit-unit operasional. Sesuai dengan tugasnya mewakili Bank dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya. Sub divisi ini juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Divisi.

10. Divisi Sumber Daya Manusia

Divisi Sumber Daya Manusia terbagi menjadi tiga sub divisi yang terdiri dari:

a. Sub Divisi Penerimaan dan Pengembangan

Sub divisi penerimaan dan pengembangan memiliki fungsi-fungsi yaitu menyusun konsep Rencana Bisnis serta Rencana Kerja menurut kebutuhan Bank, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang meliputi rencana pengadaan atau penerimaan pegawai, rekrutmen dan seleksi, pengembangan karir menyangkut promosi dan mutasi. Sub divisi ini juga melaksanakan tugas pengembangan pegawai yang meliputi pengangkatan pegawai, penilaian kondisi, absensi, kenaikan/penurunan pangkat, peringatan, pembinaan, mutasi, promosi, dan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat.



b. Sub Divisi Kesejahteraan Pegawai

Sub divisi kesejahteraan pegawai memiliki fungsi pokok yaitu menyusun konsep Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi Kesejahteraan Pegawai, mengurus dan menyusun administrasi kepegawaian yang meliputi cuti, penggajian, dan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun, izin menjalankan cuti, surat keterangan jalan, biaya perjalanan dinas, pengobatan, THT, hak pensiun kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai, termasuk lembur pegawai, mengurus penggajian/penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai, penghasilan lainnya, dan fasilitas lainnya dalam bentuk natura.

c. Sub Divisi Pendidikan dan Latihan

Sub divisi pendidikan dan latihan memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu menyusun konsep Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi Pendidikan dan Latihan, merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan pegawai baik intern maupun ekstern, menyelenggarakan dan memelihara hubungan serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan.

11. Divisi Kesekretariatan dan Umum

Divisi Kesekretariatan dan Umum memiliki tiga sub divisi yang terdiri dari:

a. Sub Divisi Kesekretariatan

Sub divisi kesekretariatan memiliki fungsi pokok yaitu menyusun konsep Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi

Kesekretariatan, menyelenggarakan hubungan kemasyarakatan baik dengan unit kerja Bank maupun dengan instansi ekstern, menyiapkan Rapat Direksi atau pertemuan yang diadakan oleh Direksi dan rapat-rapat lainnya di lingkungan Bank.

b. Sub Divisi Hukum

Sub divisi hukum memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu menyusun konsep Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi Hukum, menangani masalah-masalah hukum atau perkara-perkara perdata maupun pidana baik di dalam maupun di luar pengadilan, melakukan konsultasi dengan instansi/badan lain yang menyangkut masalah hukum.

c. Sub Divisi Umum

Sub divisi umum memiliki fungsi-fungsi yaitu menyusun konsep Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi Umum, mengatur pembelian barang-barang inventaris dan peralatan kantor atau alat tulis dan kebutuhan kantor lainnya serta pendistribusiannya, mengkoordinir penyimpanan dan pemeliharaan barang bergerak, mengelola barang-barang tidak bergerak milik Bank.

12. Divisi *Treasury*

Divisi *Treasury* terdiri dari dua sub divisi, yaitu sub divisi pasar uang dan modal dan sub divisi penghimpunan dana.

a. Sub Divisi Pasar Uang dan Modal

Sub divisi pasar uang dan modal memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu menyusun konsep rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi Pasar Uang dan Modal, menempatkan kelebihan dana dan menutupkan kekurangan dalam pasar uang/modal yang datanya diperoleh dari Sub Divisi Penghimpunan Dana, melakukan kegiatan dalam rangka penerbitan obligasi dan surat-surat berharga lainnya.

b. Sub Divisi Penghimpunan Dana

Sub divisi penghimpunan dana memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu menyusun konsep Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi Penghimpunan Dana, merumuskan kebijakan penghimpunan dana, menjabarkan kebijaksanaan Direksi dalam bidang penghimpunan dan penerahan dana, menghubungi sumber-sumber dana potensial pemerintahan maupun swasta seperti PLN, TVRI, PDAM, Telkom, Perguruan Tinggi, sekolah-sekolah, dan sumber dana lainnya.

13. Divisi Kredit

Divisi Kredit terdiri dari dua sub divisi, yaitu sub divisi pemberian kredit dan sub divisi administrasi kredit.

a. Sub Divisi Pemberian Kredit

Sub divisi pemberian kredit memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu menyusun konsep Rencana serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi Pemberian Kredit, mengajukan usul tentang usaha yang harus ditempuh dalam rangka

pengembangan kredit usaha mikro, kecil, menengah dan besar, memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Divisi Kredit tentang perbaikan prosedur kerja mengenai pemberian kredit.

b. Sub Divisi Administrasi Kredit

Sub divisi administrasi kredit memiliki fungsi-fungsi yaitu menyusun konsep Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Sub Divisi Administrasi Kredit, menyelia dan berpartisipasi aktif dalam penyiapan dan mengerjakan dokumen kredit kantor pusat dan juga memonitoring pelaksanaannya pada cabang-cabang berupa:

- Membuat perjanjian kredit dan peningkatan barang agunan secara notariil.
- Menyiapkan master pembukuan atau perubahan atau penutupan rekening pinjaman.
- Melakukan pengawasan atas perkembangan pemberian kredit kantor-kantor cabang.

14. Divisi Penyelamatan Kredit

Divisi Penyelamatan Kredit di bagi menjadi dua sub divisi yang terdiri dari:

a. Sub Divisi Penagihan Kredit Bermasalah

Sub divisi penagihan kredit bermasalah memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu merencanakan dan menyusun konsep Kebijakan Umum Direksi dalam Bidang Penyelesaian kredit non lancar/bermasalah, merencanakan dan menyusun konsep Rencana Kerja bidang penagihan kredit non lancar/bermasalah,

merencanakan dan menyusun konsep pelaksanaan tugas di bidang penagihan kredit non lancar/bermasalah.

b. Sub Divisi Restrukturisasi Kredit

Sub divisi restrukturisasi kredit memiliki fungsi-fungsi pokok yaitu merencanakan dan menyusun konsep Kebijakan Umum Direksi dalam bidang restrukturisasi kredit, merencanakan dan menyusun konsep Rencana Kerja bidang restrukturisasi kredit, merencanakan dan menyusun konsep pelaksanaan tugas di bidang penyelesaian restrukturisasi kredit, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada pada restrukturisasi kredit.

15. Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memiliki fungsi pokok yaitu menyusun konsep Kebijaksanaan Umum Direksi dalam bidang pengawasan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pemeriksaan untuk pembuatan Rencana Bisnis Bank, menyusun rencana pemeriksaan/audit intern (PKPT), melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh unit kerja meliputi:

- a. Pemeriksaan keuangan (*financial audit*).
- b. Aktivitas operasional Bank (perkreditan, dana-dana, jasa-jasa Bank, serta penunjang lainnya).
- c. Pemeriksaan terhadap ketaatan (*compliance test*) terhadap ketentuan ketentuan/perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemeriksaan manajerial (*managerial audit*).

e. Pemeriksaan terhadap pencapaian sasaran dan pengendalian intern.

Selain itu SKAI juga berfungsi melakukan pemeriksaan khusus, melakukan diskusi hasil pemeriksaan dengan unit yang diperiksa serta memberikan rekomendasi/petunjuk perbaikan.

#### 4.1.4 Aktivitas Usaha Perbankan

Sesuai dengan fungsi perbankan Indonesia yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut dalam kegiatan usahanya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan utama, yaitu pertama melakukan kegiatan operasional pasif (menghimpun dana) melalui produk-produk dan jasa perbankan lainnya. Kedua melakukan kegiatan operasional aktif (menyalurkan dana) dalam bentuk kredit.

Dalam melakukan upaya kegiatan operasional pasifnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut menawarkan produknya sebagai berikut:

##### 1. Giro Bank Maluku

Giro Bank Maluku merupakan simpanan nasabah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan warkat yang telah ditentukan. Giro Bank Maluku memberikan segala kemudahan bagi anda untuk melakukan transaksi demi kelancaran kegiatan dan bisnis anda.

## 2. Tabungan Mutiara

Tabungan Mutiara merupakan produk penghimpunan dana yang dilakukan oleh Bank Maluku. Pastikan pilihan menabung dengan berbagai keuntungan dan persyaratan yang mudah melalui Tabungan Mutiara.

## 3. Tabungan Simpeda

Tabungan di Bank Maluku yang bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (BPDSI).

## 4. Tabunganku

Tabunganku diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat diutamakan pada penabung masyarakat kecil, pelajar dan mahasiswa.

## 5. Deposito Berjangka

Deposito Berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan Bank Maluku.

## 6. Kredit Modal Kerja

Kredit jangka pendek yang diberikan guna membantu perputaran modal kerja dalam meningkatkan usaha perusahaan atau usaha perorangan.

## 7. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung dengan fasilitas penjaminan.

## 8. Kredit Pundi



Kredit yang diberikan guna membantu perputaran modal kerja dan investasi kepada keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

#### 9. Kredit Bangun Usaha (KBU)

Kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki usaha atau akan melakukan usaha.

#### 10. Kredit Investasi

Kredit jangka menengah panjang atau jangka panjang yang diberikan guna pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk proyek, rehabilitasi, modernisasi dalam meningkatkan usaha perusahaan atau usaha perorangan.

#### 11. Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Kredit yang diberikan guna membantu perputaran modal kerja dan investasi dalam upaya peningkatan pangan nasional.

#### 12. Kredit Pemilikan Rumah Bank Maluku (KPR-BM)

Kredit yang diberikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu menyediakan kebutuhan kekurangan dana guna memiliki rumah layak huni sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota masyarakat.

#### 13. Kredit Sindikasi

Pemberian kredit dengan cara kerjasama beberapa lembaga keuangan (Bank) untuk memberikan bantuan pembiayaan dalam plafond yang cukup besar.

Selain itu, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut juga memberikan pelayanan jasa dalam bentuk:



### 1. Kiriman Uang

Kiriman Uang merupakan jasa yang diberikan oleh Bank Maluku kepada nasabah berupa pemindahan/pengiriman uang atas perintah pengirim dari suatu tempat menuju tempat penerima kiriman dari antar kota di seluruh Indonesia.

### 2. BPD Card

BPD Card merupakan kartu yang diterbitkan bank, sebagai sarana yang dipergunakan nasabah untuk melakukan transaksi tunai maupun non tunai di mesin ATM milik Bank atau mesin ATM Bank kerjasama.

### 3. Kliring

Kliring merupakan sarana perhitungan warkat antar Bank guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giro dalam satu wilayah kliring. Peserta kliring adalah Bank-bank Umum baik swasta maupun pemerintah.

### 4. Cash Management System

Mengakses informasi dan monitoring terhadap rekening-rekening secara online pada kantor Pemerintah Daerah.

### 5. Layanan Pembayaran Gaji

Layanan pembayaran gaji merupakan proses kegiatan yang dilakukan Bank dalam melakukan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil kepada Bendahara Gaji/Penerima Gaji.

### 6. Layanan Modul Penerimaan Negara

Layanan modul penerimaan negara merupakan modul yang digunakan sebagai penerimaan pajak oleh Bank yang telah ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Bank penerima setoran.

#### 7. RTGS

*Real Time Gross Settlement Bank Indonesia* yang merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

#### 8. SKBDN

Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri merupakan instrument yang diterbitkan oleh Bank (*Issuing Bank*) atas permintaan *Applicant* yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada *Benefi ciary* apabila *issuing Bank* menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN.

#### 9. Referensi Bank

Surat keterangan yang diterbitkan oleh bank untuk nasabah, dipergunakan sebagai referensi untuk melakukan suatu kegiatan dan bersifat tidak mengikat.

#### 4.1.5 Gambaran Singkat Kredit Investasi

Seperti bank lain pada umumnya, maka di PT Bank Maluku Malut juga merupakan sumber penyaluran dana yang utama sekaligus merupakan sumber pendapatan operasional terbesar. Sebagaian besar kredit di Bank Maluku Malut diberikan dalam bentuk Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang berjangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

Kredit investasi yang diberikan di Bank Maluku Malut digunakan untuk membiayai pengembangan usaha dalam bentuk pembuatan bangunan usaha (misalnya pembuatan gudang, perluasan bangunan untuk produksi, perluasan bangunan bagian kantor dan lainnya), pembelian mesin-mesin, kendaraan, dan peralatan.

Sasaran yang ingin dicapai Bank Maluku malut didalam penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi ini, adalah untuk mengembangkan portofolio kredit porfotolio kredit investasi yang sehat dan menguntungkan melalui pemberian kredit investasi di kantor cabang yang memperhatikan asas kehati-hatian dengan memfokuskan pada segmen pasar pada kantor cabang serta, memberikan pelayanan produk yang sesuai dengan kebutuhan peminjam/calonpeminjam.

#### **4.2 Prosedur Pemberian Kredit Investasi dan Penagihannya**

Prosedur pemberian kredit adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam setiap permohonan kredit baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Langkah-langkah yang dimaksud adalah langkah-langkah sejak pengajuan permohonan kredit sampai pelunasan kembali kredit yang bersangkutan.

##### **4.2.1 Persiapan dan Pengajuan kredit**

Dalam proses pemberian kredit ini merupakan kegiatan pengumpulan informasi, baik yang menyangkut data kualitatif maupun data kuantitatif calon debitur. Tahap ini merupakan awal dimulainya transaksi kredit yaitu dengan diterima surat permohonan pinjaman (SPP) yang diajukan oleh calon debitur. Tahap ini merupakan awal dimulainya transaksi kredit yaitu dengan diterima Surat Permohonan Pinjaman (SPP) yang diajukan oleh calon debitur.

1. SPP dapat diajukan sendiri oleh calon debitur dengan datang sendiri ke kantor cabang atau pejabat lini datang sendiri ke rumah/ke tempat usaha calon debitur, sesuai dengan informasi yang diperoleh, serta membawa permohonan pinjam yaitu KPPB (Keterangan Permohonan Pinjam untuk Bisnis)/KPPK (Keterangan Permohonan Pinjam untuk Konsumen), sedangkan SPP diterima pada saat itu juga.
2. Bila calon debitur datang sendiri, SPP diterima oleh petugas pelayanan kemudian mengisi SKKP dengan SPP, yang selanjutnya diserahkan kepada pimpinan cabang untuk mendapat disposisi.
3. Pimpinan cabang mendisposisikan atau menunjuk AO (*Accountt Officer*)nya, kemudia KPPB dan SPP diserahkan kembali kepada seksi pelayanan pinjaman dan seksi ini mencatat penyerahannya pada KPPB tersebut dan dilanjutkn kepada AO.
4. AO mencatat tanda penerimaan SPP dan KPPB, kemudian melakukan kunjungan kepada calon debitur atau on the spot. Dalam tahap persiapan kredit prosedur selanjutnya yaitu pada KPPB dipertimbangkan untuk diproses.
5. Pada saat ont the spot (OTS), AO melakukan interview dengan calon debitor mengenai data legalitas perusahaan maupun keuangannya dengan berpedoman pada prinsip 5C.

Data mengenai legalitas perusahaan diantaranya:

- a. Akte Perusahaan
- b. SIUO

- c. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)
- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Data mengenai keuangan diantaranya:

- a. Laporan keuangan
- b. Daftar Laba-Rugi
- c. *Cash flows*

6. AO mencantumkan kesimpulan pada KPPB dan meneruskan kepada Pinca untuk selanjutnya dilakukan analisis kredit.

Jika terdapat permohonan pinjaman yang ditolak untuk diproses, maka penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya, kepada calon debitur yang ditandatangani oleh pejabat kredit lain.

#### **4.2.2 Pembinaan dan Analisa Kredit**

Setelah AO memutuskan bahwa KPPB tersebut dapat diproses lebih lanjut, maka AO melakukan identifikasi data secara kuantitatif dan kualitatif dalam analisis terhadap permohonan kredit:

1. AO melakukan kunjungan nasabah (on the spot) ke tempat usaha, dan lokasi jaminan calon debitur. Kemudian melakukan wawancara kembali dengan calon debitur untuk mengetahui latar belakangnya menanyakan manajemen dari aktivitas perusahaan.
2. Data yang diperoleh dituangkan dalam formulir.
3. AO melakukan analisis terhadap data tersebut.

Hasil dari penelitian tersebut dicocokkan dengan sasaran dan criteria resiko yang dapat diterima kantor cabang. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan apakah permohonan kredit layak diberikan. Jika tidak layak diberikan maka diberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan cabang.

#### 4.2.3 Keputusan Kredit

Hasil analisis kredit yang diterima oleh ADK pada saat SKKP diputuskan, prosedur selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. ADK memeriksa hasil analisis kredit. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur kredit, serta melakukan penilaian secara menyeluruh dan apabila tidak ada hal-hal yang memberatkan, maka dilakukan perhitungan kredit untuk menetapkan jumlah maksimum kredit yang diberikan kepada nasabah.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket kredit, maka ADK (baik jumlah kredit yang disetujui maupun sebagian yang diajukan debitur) menandatangani PTK terhadap debitur yang disetujui.

Dalam keputusan kredit harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Plafond
- b. Sector usaha yang dibiayai
- c. Jenis kredit
- d. Jangka waktu kredit
- e. Suku bunga
- f. Jaminan kredit

Selanjutnya paket kredit diserahkan kepada manajer pemasaran dan pimpinan cabang untuk mendapatkan putusan. Apabila limit kredit dibawah atau diatas limit yang diberikan pimpinan cabang, maka manajer pemasaran mengajukan permintaan putusan melalui ADK Kanwil.

#### 4.2.4 Realisasi dan Administrasi Kredit

1. ADK mendapatkan kembali PTK Kredit kemudia paket kredit tersebut diteruskan ke seksi petugas ADK komersial untuk membuat:
  - a. Surat Perjanjian Membuka Kredit
  - b. Surat Permintaan Asuransi
  - c. Surat permintaan kepada notaries untuk dibuat akte notaries tentang perjanjian kredit dengan melampirkan data yang lengkap termasuk agunan untuk dibuatkan CV-nya (Pengikat Kredit)
  - d. Speciment nasbah pada KCTT
2. Petugas ADK Komersial memeriksa kelengkapan, kebenaran dari berkas pinjaman tersebut, apabila telah yakin benar, maka dibuat IRK (Instruksi Realisasi Kredit)
3. IRK dengan berkas pinjaman, kemudian diserahkan kepada supervisor ADK untuk diperiksa secara menyeluruh apakah SPMK telah dibuat dengan benar, setelah diperiksa maka supervisor ADK menandatangani IRK. Selanjutnya IRK serta paket kredit diserahkan kepada manajer pemasaran untuk realisasi.

Setelah IRK dan paket kredit diterima oleh manajer pemasaran selanjutnya diteruskan kepada seksi pelayanan pinjaman untuk direalisasikan. Setelah realisasi

kredit dilakukan, maka diadakan pengelolaan berkas pinjaman dan dilakukan pengaman. Berkas-berkas pinjaman yang telah direalisasikan dipisah-pisah menjadi berkas pinjaman I dan II oleh petugas pelayanan pinjaman. Untuk berkas I disimpan oleh manajer pemasaran dalam satu ruangan khusus yang disebut KLUS (tempat penyimpanan dokumen, surat-surat, barang-barang berharga lainnya) sedangkan berkas II disimpan oleh Supervisor ADK.

#### **4.2.5 Pembinaan dan Pengawasan Kredit**

Pada hakekatnya pengawasan yang dilakukan terhadap pemberian kredit ini dimaksudkan untuk mencegah kredit macet. Oleh karena itu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan difokuskan kepada pengawasan internal dan eksternal.

Pada tahap pembinaan dan pengawasan ini dilanjutkan dengan mengidentifikasi gejala yang timbul karena factor keuangan, factor manajemen, dan factor eksternal. Kemudian dilakukan analisis dan dicari alternative pemecahan masalahnya.

Dengan adanya pembinaan dan pengawasan kredit, akan dapat diperoleh gambaran kualitas setiap nasabah dan kesimpulan *performancenya* yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan rencana tindak lanjut.

#### **4.2.6 Tahap Penagihan dan Penyelesaian Kredit**

Ada beberapa tindak lanjut yang dilakukan oleh bank dalam menghadapi masalah kredit (tunggakan kredit). Tindakan tersebut selain diamsukkan untuk mengamankan kepentingan bank juga sebagai upaya perbaikan atas *performance* usaha debitur.



Jaminan merupakan sumber pelunasan setelah kapasitas usahanya tidak mampu menunjukkan kewajiban peminjam. Dalam hal ini debitur menunjukkan tanda-tanda menunggak, maka pengamanan jaminan perlu segera dilakukan antara lain:

1. Pemasangan hipotik, kelengkapan administrasi jaminan dan penilaian kembali atas jaminan untuk mengetahui seberapa besar jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang.
2. Dalam hal kelemahan manajemen penyebab utama menunggaknya kredit maka bank dapat mengajukan alternative penggunaan konsultan manajemen kepada debitur.
3. Bank juga dapat melakukan pembinaan secara lebih insentif langkah ini dinilai lebih baik, mengingat hubungan antara bank dengan debitur memang harus saling terbuka. Dari pihak bank tentunya dituntut untuk menyediakan staf yang sudah berpengalaman.
4. Tindakan lainnya adalah dengan *rescheduling* (perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jangka waktunya saja), *restructuring* (penataan kembali syarat-syarat kredit yang menyangkut penanaman dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi penyertaan dalam perusahaan debitur, yang dapat disertai dengan penjadwalan atau persyaratan kembali). *Reconditioning* (persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran,

jangka waktu, atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit), maupun *take over* oleh perusahaan lain.

5. Bank dapat melakukan penagihan pinjaman baik dengan mengajukan klaim kepada pihak asuransi, pemberian keringanan bunga maupun likuidasi atas jaminan
6. Alternative lainnya adalah melakukan penghapusan pinjaman/penjualan assets debitur
7. Semua upaya tersebut diatas dilakukan pihak bank dengan tujuan untuk mengantisipasi kegagalan atau tidak kembalinya dana yang telah disalurkan melalui pemberian kredit. Disamping itu juga dalam rangka mencapai efektivitas pelaksanaan pengkreditan yang secara langsung akan meningkatkan tujuan perusahaan.

#### **4.3 Sistem dan Prosedur Audit Internal dalam Pemberian Kredit Investasi**

Audit satuan kerja audit internal dalam melakukan fungsinya meliputi audit rutin dan audit khusus. Audit rutin dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan yang terdapat dalam program kerja pengawasan tahunan, minimal audit rutin dilakukan satu kali dalam setahun. Umumnya audit rutin dilakukan pada unit kerja/cabang yang mempunyai pertumbuhan kredit investasi yang cukup tinggi dan cepat, cabang yang mempunyai permasalahan kredit/fraud, dsb. Sedangkan audit khusus hanya dilaksanakan apabila dipandang penting untuk dilakukan atau adanya permintaan khusus dari kantor pusat.

Aktivitas yang dilakukan oleh satuan kerja audit internal PT Bank Maluku Malut Adalah sebagai berikut:

1 Memeriksa dan menilai pelaksanaan perencanaan Kredit

Kantor cabang harus melaksanakan perencanaan kredit yang telah ditetapkan oleh kantor pusat dan diwajibkan membuat laporan secara tertulis secara periodic.

a. Jumlah plafon maksimum kredit

Jumlah plafon maksimum kredit pada kantor cabang ditentukan dan direncanakan oleh kantor pusat untuk setiap tahunnya dan dijadikan dasar oleh kantor cabang di dalam melakukan ekspektasi kreditnya. Penentuan jumlah plafon kredit untuk setiap kantor cabang akan berbeda-beda. Plafon maksimum kredit investasi yang diberikan PT Bank Maluku Malut untuk kredit usaha kecil adalah sampai sebesar Rp 500 juta.

SKAI memeriksa dan menilai jumlah plafon maksimum kredit yang diberikan kantor cabang Sorong kepada debitur, sehingga dapat dilihat apakah eskpansi kredit kantor cabang sudah memenuhi jumlah plafon kredit atau belum.

b. Alokasi sector kredit

Didalam perencanaan kredit juga ditentukan alokasi sector kredit, dimana PT.Bank Maluku Malut mengalokasikan sebgaaian besar kreditnya kepada kredit usaha kecil sesuai dengan kebijakan kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. SKAI memeriksa dan menilai apakah alokasi kredit pada kantor Cabang telah sesuai dengan kebijaksanaan kredit yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

## 2 Memeriksa dan menilai Kebijaksanaan Kredit

Auditor internal akan melakukan audit atas pelaksanaan kebijaksanaan kredit bank dengan acuan pada pedoman-pedoman, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan, surat edaran, dan lainnya yang telah dilakukan oleh kantor pusat maupun Bank Indonesia. Audit ini dilakukan atas:

### a. Tahap pengajuan permohonan kredit

Pada tahap ini dilakukan audit terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan permohonan kredit yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

### b. Tahap penilaian dan analisa kredit

pada tahap ini dilakukan audit terhadap dokumen yang berisikan penilaian dan analisa yang telah ditentukan sebelumnya terhadap calon debitur dengan tujuan untuk menilai apakah penilaian dan analisa ini telah memadai atau belum baik dari segi tenaga atau petugas yang melakukan penilaian dan analisa kredit, dari segi data yang berasal dari debitur maupun teknik analisa kredit.

### c. Tahap keputusan atas permohonan kredit

Pada tahap ini dilakukan audit atau penilaian terhadap prosedur keputusan permohonan kredit yang meliputi kewenangan dari pemutus kredit, hubungan antara pemutus kredit dengan debitur, serta batas maksimum pemberian kredit.

d. Tahap realisasi dan administrasi kredit

Pada tahap ini dilakukan audit dan penilaian terhadap administrasi perkreditan terutama terhadap kartu operasional yang menunjukkan perkembangan para debitur dalam hal pembayaran hutang pokok dan pembayaran bunga.

e. Tahap pengawasan dan pemberian kredit

Pada tahap ini dilakukan audit dan penilaian terhadap administrasi perkreditan terutama tahap kartu operasional yang menunjukan perkembangan pada debitur dalam hal pembayaran hutang pokok dan pembayaran bunga.

f. Tahap pengendalian dan penyelesaian kredit

Pada tahap ini dilakukan audit terhadap dokumen yang berikat dengan daftar kredit yang jatuh tempo dengan tujuan untuk mengetahui jumlah debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Disamping itu audit pada tahap ini dilakukan terhadap arsip-arsip yang berhubungan dengan surat-surat penagihan kepada debitur serta melakukan penilaian terhadap penanganan kantor cabang dalam menyelamatkan kredit yang telah diberikan kepada debitur.

#### **4.4 Prosedur Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Investasi pada PT Bank Maluku Malut**

##### **4.4.1 Perencanaan Audit**

Berdasarkan wawancara dan pengamatan terhadap pedoman audit intern Bank Papua Cabang Sorong, tahap perencanaan audit terdiri dari:

1. Tim auditor melakukan penelitian risk profile terhadap unit kerja yang akan diaudit dan penelitian pendahuluan untuk mengenal dan memahami setiap

kegiatan atau fungsi auditee secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal strategis sehingga auditor dapat merumuskan tujuan secara jelas.

2. Penyampaian surat pemberitahuan audit, berupa surat tugas yang akan diberikan kepada kepala divisi yang akan diaudit, yang selanjutnya akan memberitahukan kepada bawahannya tentang adanya audit dan memberikan instruksi untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan.

3. Susunan Tim

Susunan tim Pemeriksaan dari Ketua Tim dan Anggota. Ketua Tim bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan dilapangan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan.

4. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit

Pada ruang lingkup audit dijelaskan mengenai cakupan audit yang akan dilaksanakan. Ruang lingkup pemeriksaan RIC meliputi pemeriksaan financial, operasional dan kepatuhan yang mencakup penilaian terhadap keandalan, efektivitas dan efisiensi system pengendalian intern bank. Tujuan audit secara umum adalah merealisasikan rencana kerja tahunan tim audit RIC perkreditan dan memberikan penilaian serta rekomendasi atau saran kepada pihak yang berwenang guna pengambilan tindakan perbaikan. Sedangkan tujuan audit internal secara khusus yaitu untuk memberikan informasi dan rekomendasi kepada Manajemen mengenai SPI unit Kerja terperiksa, kewajaran laoran keuangan, aktivitas

pencapaian anggaran, pelaksanaan kebijakan dan prosedur serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber data.

#### 5. Waktu dan periode pemeriksaan

Waktu pemeriksaan merupakan lamanya waktu (jumlah jam kerja) yang diperlukan oleh Tim Audit dalam melakukan pemeriksaan pada suatu objek pemeriksaan. Sedangkan periode pemeriksaan dihitung sejak pemeriksaan terakhir sampai dengan berakhirnya pemeriksaan.

#### 6. Metode pemeriksaan

Metodologi audit yang dipakai adalah RBA (*risk based audit*) untuk menilai efektivitas control operasional dalam kerangka COSO. Proses audit dilakukan melalui dua pendekatan yaitu *control characteristics based* (untuk menilai internal environment, objective, setting, event identification, risk assessment dan risk response) dan *control process based* (untuk control activity, informasi communication, dan monitoring).

#### 7. Persiapan pemeriksaan

- a. Hasil pemeriksaan yang lalu
- b. Tindak lanjut pemeriksaan yang lalu
- c. Penilaian dari objek yang diperiksa

Dalam tahap perencanaan auditor mencari data tertulis sehingga auditor dapat memastikan bahwa perbankan terutama pada bagian pemberian kredit telah menerapkan praktik-praktik prosedur audit secara konsisten. Dengan adanya tahap perencanaan sangat membantu audit internal dalam pengambilan langkah-langkah

pemeriksaan yang harus ditempuh dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian pemeberian kredit dapat menghemat waktu dan biaya saat pemeriksaan.

Pada tahap perencanaan audit internal melakukan wawancara dengan pihak manajemen dan beberapa karyawan bagian akuntansi, dan keuangan, bagian kredit dengan tujuan untuk lebih memahami kebijakan yang dijalankan oleh perbankan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pada bagian yang sedang diaudit dan memperoleh informasi mengenai permasalahan yang ada. Pada tahap ini auditor menemukan temuan yang mengindikasi adanya penyimpangan prosedur dan kebijakan pemberian kredit.

Wawancara ini hanya sifatnya hanya meberikan gambaran sekilas tentang keadaan perbankan secara umum. Dengan adanya wawancara dengan berbagai pihak yang dalam perbankan maka auditor akan memiliki cukup pengetahuan untuk mengidentifikasi berbagai bidang dan peristiwa yang dianggap penting dan juga untuk menentukan hal-hal apa dan dimana yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Wawancara tersebut di lakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dan dalam bentuk kuesioner. Hasil rekapitulasi kuesioner pada tahap perencanaan yang dilakukan kepada karyawan bagian kredit perbankan dapat dilihat pada table 4.1 sebagai berikut.



**TABEL 4.1**  
**REKAPITULASI KUISIONER**  
**PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS**  
**PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT**  
**INVESTASI PADA PT BANK MALUKU MALUT**  
**Penelitian Kuesioner Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit**

Keterangan : Rekapitulasi ini berasal dari 13 kuesioner

No	Pertanyaan- Pertanyaan	Y	T
<b>Lingkungan Pengendalian</b>			
1	Apakah kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten?	12	1
2	Apakah ada tindakan manajemen yang dilaksanakan secara intensif untuk mengurangi tindakan pegawai yang berbuat tidak jujur?	10	3
3	Apakah manajemen memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif?	5	8
4	Apakah dalam perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab?	12	1
5	Apakah perusahaan memiliki satuan komite audit?	13	0
6	Apakah terdapat deskripsi tugas pegawai dan kebijakan terkait dalam hubungannya dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab?	13	0
<b>Penafsiran Risiko</b>			
	Apakah manajemen melakukan penafsiran risiko atas kemungkinan salah saji laporan keuangan yang meliputi kejadian-kejadian internal dan eksternal yang timbul karena:		
7	Perubahan dalam lingkungan operasional atas pemberian kredit dalam perusahaan?	10	3
8	Penempatan karyawan baru dalam aktivitas pemberian kredit?	9	4
9	Perubahan dalam system informasi pemberian kredit?	10	3
10	Peningkatan Aktivitas pemberian kredit?	12	1
11	Perubahan pada penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dalam pemberian kredit?	9	4

Aktivitas Pengendalian			
12	Apakah kedudukan fungsi administrasi kredit terpisah dengan fungsi akuntansi pemberian kredit ?	12	1
13	Apakah bukti pemberian kredit masuk terdiri dari beberapa rangkapan dan didistribusikan kepada bagian yang berbeda guna kepentingan pengawasan internal?	10	3
14	Apakah saldo kredit yang ada dapat dijamin perlindungannya dari kemungkinan penipuan	8	5
15	Apakah fungsi pemberian kredit dilengkapi oleh alat-alat yang dapat mencegah tindakan penipuan terhadap aktivitas kredit yang dilaksanakan?	11	2
16	Apakah kredit yang sedang dalam proses mendapatkan perlindungan asuransi?	13	0
17	Apakah kredit yang sedang dalam proses mendapatkan perlindungan asuransi?	13	0
18	Apakah terdapat fungsi yang tidak terlibat dalam penyimpangan kredit, pemberian kredit dan pencatatan kredit, yang menggunakan rekening Koran bank untuk mengecek ketelitian dan keakuratan catatan pemberian kredit?	10	3
19	Apakah dokumen pemberian kredit telah bernomor urut dan tercetak?	5	8
20	Apakah terdapat pengecekan independen untuk menguji kesesuaian jumlah pemberian kredit dengan data penerimaan kas yang diterima?	12	1
Informasi dan Komunikasi			
21	Apakah terdapat system informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menunjukkan dan mencatat semua transaksi pemberian kredit yang sah?	11	2
22	Apakah terdapat system informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk mengukur nilai transaksi pemberian kredit yang benar dalam mencatat nilai moneterinya di dalam laporan keuangan yang wajar?	11	2
23	Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk	9	4

	transaksi pemberian kredit yang mengungkapkan pemberian kredit yang berhubungan dengan laporan keuangan secara wajar dalam perusahaan ?		
24	Apakah terdapat system informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan dalam pengotorisasian transaksi-transaksi pemberian kredit oleh pejabat yang berwenang?	10	3
Pemantauan			
25	Apakah manajemen melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai efektivitas rancangan dan operasi pengendalian internal pemberian kredit?	13	0
Keandalan pelaporan pemberian kredit			
26	Apakah data transaksi pemberian kredit telah disajikan secara akurat dan teliti?	13	0
27	Apakah data transaksi pemberian kredit bersifat dapat diandalkan atau dapat dipercaya	13	0
Efisiensi dan Efektivitas pemberian kredit			
28	Apakah aktivitas pemberian kredit telah aman dari risiko kecurangan dan penipuan?	11	2
29	Apakah aktivitas pemberian kredit telah aman dari penyimpangan dan penyalahgunaan dana dari personel yang tidak bertanggung jawab?	9	4
30	Apakah sejauh ini pelaksanaan pemberian kredit sudah efektif dan efisien?	12	1

Informasi yang berhasil dikumpulkan pada tahap ini akan dijadikan bahan untuk menyusun suatu rencana atau review dan pengujian pengendalian manajemen.

**TABEL 4.2**  
**REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN**  
**BERDASARKAN JUMLAH JAWABAN**  
**PADA PT BANK MALUKU MALUT**

No	Indikator Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Investasi	Y	T	Total	Persentase
1	Lingkungan Pengendalian	65	13	78	83%
2	Penafsiran Risiko	50	15	65	77%
3	Aktivitas Pengendalian	94	23	117	80%
4	Informasi dan Komunikasi	41	11	52	79%
5	Pemantauan	13	0	13	100%
6	Keandalan pelaporan kredit	26	0	26	100%
7	Efisiensi dan Efektivitas Pemberian kredit	32	7	39	82,05%

Sumber: data kuesioner yang telah di olah, 2017

Jika total keseluruhan jawaban Ya dan jawaban Tidak diakumulasikan beserta dengan seluruh jawaban kuesioner maka dapat diukur berperan tidaknya audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian pemberian kredit.

Jumlah jawaban "Ya" = 321

Jumlah jawaban "Tidak" = 69

Jumlah jawaban kuesioner = 390

Maka persentase yang didapatkan:

$$= \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah jawaban "Tidak"}} \times 100\%$$

$$= \frac{321}{390} \times 100\% = 82\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, persentase efektivitas pengendalian internal pemberian kredit sebesar 82%, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian interna pemberian kredit pada PT Bank Maluku Malut dikatakan efektif.

#### 4.4.2 Tahap Menguji dan Mengevaluasi Informasi

Tahap selanjutnya dalam penelitian dengan mengikuti tahapan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit PT Bank Maluku Malut adalah tahap menguji dan mengevaluasi informasi. Pengendalian manajemen perbankan yang merupakan inti dari aktivitas audit, karena pada tahap ini diperoleh temuan-temuan yang merupakan ciri khas aktivitas audit. Pemeriksaan seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemberian kredit investasi mulai dari tahap permohonan hingga tahap monitoring, pengumpulan bukti dan informasi yang cukup kompeten dan relevan berupa semua data dan informasi yang dapat dipakai auditor untuk mendukung temuan auditnya. Dari hasil pengujian ini, penelitian dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada PT Bank Maluku Malut sehingga lebih mudah mengetahui potensi-pontesi terjadinya kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan.

Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perbankan sudah memiliki pengendalian intern yang memadai. Hal ini dapat dilihat

dari jawaban yang diperoleh untuk mengindikasikan adanya kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dalam kegiatan pemberian kredit. Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan maka tarik kesimpulan bahwa perbankan susah memiliki system pengendalian yang cukup baik. Memiliki pengendalian yang cukup baik bukan berarti tidak memiliki kelemahan-kelemahan dalam pengendalian kegiatan perbankan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Hasil dari review dan penelitian system pengendalian manajemen terhadap efektivitas pengendalian internal pemberian kredit perbankan adalah sebagai berikut:

1. kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten
2. ada tindakan manajemen yang dilaksanakan secara intensif untuk mengurangi tindakan pegawai yang berbuat tidak jujur
3. manajemen belum memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif
4. dalam perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab
5. perusahaan memiliki satuan komite audit
6. terdapat deskripsi tugas pegawai dan kebijakan terkait dalam hubungannya dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
7. terdapat deskripsi tugas pegawai dan kebijakan terkait dalam hubungannya dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
8. Penempatan karyawan baru dalam aktivitas pemberian kredit

9. Perubahan dalam sistem informasi pemberian kredit
10. Peningkatan aktivitas pemberian kredit
11. Perubahan pada penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dalam pemberian kredit.
12. Pemberian kredit hanya diberikan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
13. Bukti pemberian kredit masuk dibuat menjadi beberapa rangkap dan didistribusikan kepada bagian yang berbeda guna kepentingan pengawasan internal.
14. Saldo kredit yang ada dijamin perlingkungannya dari kemungkinan besar adanya penipuan.
15. Pencatatan dalam jurnal pemberian kredit didasarkan pada bukti kredit masuk yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen lengkap.
16. Fungsi pemberian kredit dilengkapi oleh alat-alat yang dapat mencegah tindakan penipuan terhadap aktivitas kredit yang dilaksanakan.
17. Kredit yang sedang dalam proses dan yang sedang berjalan masing-masing mendapatkan perlindungan asuransi.
18. Fungsi yang tidak terlihat dalam penyimpanan kredit, pemberian kredit dan pencatatan kredit menggunakan rekening Koran bank untuk mengecek ketelitian dan keakuratan catatan pemberian kredit.
19. Dokumen pemberian kredit belum diberikan nomor urut yang tercetak.
20. Untuk menguji kesesuaian jumlah pemberian kredit dengan data kas yang

diterima dilakukan dengan pengecekan independen.

21. Adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatancatatan yang menunjukkan dan mencatat semua transaksi pemberian kredit yang sah.
22. Adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatancatatan untuk mengukur nilai transaksi pemberian kredit yang benar dalam mencatat nilai moneterinya di dalam laporan keuangan yang wajar.
23. Adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatancatatan untuk transaksi pemberian kredit yang berhubungan dengan laporan keuangan secara wajar dalam perusahaan
24. Adanya sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatancatatan dalam pengotorisasian transaksi-transaksi pemberian kredit oleh pejabat yang berwenang.
25. manajemen melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai efektivitas rancangan dan operasi pengendalian internal pemberian kredit
26. data transaksi pemberian kredit telah disajikan secara akurat dan teliti
27. data transaksi pemberian kredit bersifat dapat diandalkan atau dapat dipercaya
28. aktivitas pemberian kredit telah aman dari risiko kecurangan dan penipuan
29. aktivitas pemberian kredit telah aman dari penyimpangan dan penyalahgunaan dana dari personel yang tidak bertanggung jawab
30. sejauh ini pelaksanaan pemberian kredit sudah efektif dan efisien



#### 4.4.3 Laporan Hasil Audit

Setelah menganalisa temuan-temuan dan mendiskusikan dengan bagian perkreditan dikantor cabang yang menjadi obyek audit, selanjutnya tim SKAI membuat laporan hasil audit yang memuat mengenai laporan kegiatan audit, temuan-temuan yang didapat dari hasil audit, serta pendapat atau saran-saran perbankan mengenai aktivitas yang audit.

Pada tahap ini audit internal membuat laporan hasil audit. Laporan audit internal atas pemberian kredit dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada direktur. Laporan harus disusun secara obyektif, jelas, dan singkat agar isinya mudah dimengerti. Laporan audit internal pada umumnya meliputi unsure-unsur sebagai berikut:

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit, untuk memberikan gambaran manfaat tersebut kepada pembaca
2. Temuan audit, yang dijelaskan secara obyektif dalam bahasa yang jelas dan sederhana
3. Saran dan rekomendasi, untuk mengambil tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada.

Hasil audit internal merupakan indikasi yang menunjukkan sampai sejauh mana audit yang telah dilakukan mendapatkan tanggapan dan dukungan dari pimpinan perbankan, karena segala usaha yang dilakukan dalam melaksanakan audit internal akan berarti apabila disertai dengan tindak lanjut atas saran atau rekomendasi yang telah diberikan.

#### 4.4.4 Tindak Lanjut Hasil Audit

Pada tahap ini, SKAI membantu memberikan solusi/rekomendasi, memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh auditee. Tindak lanjutnya meliputi:

##### 1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut

Pemantauan ini harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan mengingatkan auditee bila belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Pemantauan ini dilakukan dengan cara memantau temuan, catatan, serta dari laporan rutin kegiatan unit kerja auditee atau laporan khusus sesuai yang diminta SKAI.

##### 2. Laporan tindak lanjut

Laporan ini berisikan hasil tindak lanjut atas temuan audit.

Sesuai dengan hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan penulis, terdapat temuan audit dan rekomendasi yang merupakan elemen paling kritis dari audit internal, yaitu mekanisme untuk meyakinkan dan mempengaruhi manajemen untuk mengambil tindakan. Setiap temuan audit harus diidentifikasi dan dikembangkan kemudian harus dilaporkan kepada pihak manajemen supaya pihak manajemen dapat mengambil tindakan perbaikan sesegara mungkin.

Adapun saran dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh perbankan antara lain :

1. Manajemen belum memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif

## a. Kondisi :

Bagian manajemen belum memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif

## b. Criteria :

Bagian manajemen harus memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif

## c. Akibat :

Bagian Manajemen dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha dari kredit yang hendak dicapai.

## d. Rekomendasi :

Bagian manajemen perlu memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan spesifik dari kredit dapat tercapai.

## 2. Dokumen pemberian kredit belum bernomor urut dan tercetak

## a. Kondisi :

Perbankan tidak membuat nomor urut yang tercetak pada dokumen pemberian kredit.

## b. Criteria :

Perbankan sebaiknya membuat nomor urut yang tercetak pada dokumen pemberian kredit.

## c. Akibat :

Dapat terjadi penomoran berganda pada dokumen pemberian kredit.

d. Rekomendasi :

Perbankan diharapkan menggunakan komputerisasi dalam pengelolaan datanya, agar penomoran dokumen maupun catatan setiap transaksi yang telah terjadi dilakukan secara langsung dan tidak ada penomoran ganda.

#### 4.5 Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian kredit

Dari hasil wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis untuk menilai efektivitas pemberian kredit dari segi target dan realisasi pemberian kredit yang telah ditetapkan setiap tahunnya dan selisih yang ada masih dalam batas toleransi. Untuk selisih pencapaian realisasi pemberian kredit PT Bank Maluku Malut membuat kebijakan bahwa jika selisih (kurang) antara 3% - 5% dari anggaran yang ditetapkan untuk periode yang bersangkutan maka pemberian kredit tersebut sudah memenuhi target perbankan. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemberian kredit, penulis menggunakan data yang berupa pemberian kredit tahun 2015 dan tahun 2016 pada PT Bank Maluku Malut yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis varian apakah pemberian kredit telah sesuai dengan target yang telah dianggarkan. Persentase varian terjadi dihitung dengan membandingkan realisasi pemberian kredit dengan anggaran pada tahun yang bersangkutan. Anggaran dan realisasi pemberian kredit pada tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada table 4.3 sebagai berikut:

**TABEL 4.3**  
**SELISIH ANGGARAN DAN REALISASI PEMBERIAN KREDIT**  
**PT BANK MALUKU MALUT TAHUN 2015 DAN 2016**

Tahun	Realisasi	Anggaran	Selisih	%
2015	83.302.973.982	78.619.776.256	4.683.197.726	105,95%
2016	101.740.794.977	89.915.571.520	11.825.223.457	113,15%

Sumber : bagian kredit PT Bank Maluku Malut yang telah diolah

Dari tabel 4.3 dapat dilihat pemberian kredit pada PT Bank Maluku Malut selama kurun waktu 2 (dua) tahun cukup efektif, selalu mencapai target yang dianggarkan. Terlihat pada tahun 2015 realisasi penerimaan kredit sebesar Rp 83.302.973.982 lebih tinggi Rp 4.683.197.726 dari anggaran tahun 2015 (Rp 78.619.776.256) atau sebesar 105,95%. Begitu pula pada tahun 2016, realisasi mencapai Rp 101.740.794.977 lebih tinggi Rp 11.825.223.457 dari anggaran tahun 2016 (Rp 89.915.571.520) atau sebesar 113,15%. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengendalian internal pemberian kredit pada PT Bank Maluku Malut telah tercapai.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan audit internal terlihat bahwa peranan audit operasional pada PT Bank Maluku Malut telah mengikuti tahap-tahap audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pemberian kredit inestasi.s

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian mengenai “Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit Investasi”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit yang dilaksanakan pada PT Bank Maluku Malut telah mengikuti tahap-tahap audit Internal yang terdiri dari perencanaan audir, pengujian dan pengevaluasian informasi, laporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
2. Pengendalian Internal pemberian kredit untuk periode tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan dengan efektif oleh PT Bank Maluku Malut. Hal ini dapat dilihat dari data pemberian kredit untuk tahun 2015 tingkat efektivitas pemberian kredit investasi adalah sebesar 105,95%, sedangkan pada tahun 2016 tingkat efektivitas pemberian kredit investasi adalah sebesar 113,15% di atas anggaran anggaran yang telah ditetapkan.
3. Dari hasil kuesioner dan analisa data yang didapatkan maka pada PT Bank Maluku Malut pelaksanaan aktivitas pemberian kredit selalu berpedoman pada kebijakan, system dan prosedur pemberian kredit yang diterapkan. Akan tetapi, bagian manajemen belum memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif sehingga dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha dari kredit yang

hendak dicapai. Dan dokumen pemberian kredit yang belum bernomor urut dan tercetak sehingga dapat mengakibatkan dokumen penomoran berganda.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan Perbankan sehubungan dengan hasil kesimpulan adalah:

1. Masih perlu pembinaan terhadap objek yang diaudit khususnya bagian yang berkaitan dengan pengelolaan kredit investasi tentang pentingnya pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI, sehingga dapat membantu di dalam proses audit.
2. Melakukan perbaikan manajemen bagian pengkreditan dengan jalan berkerjasama dengan debitur yang sudah ada dengan menawarkan berbagai inovasi dan kebijakan baru agar target pemberian kredit yang tercapai dapat dipertahankan dan dikembangkan
3. Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengendalian pemberian kredit pada PT Bank Maluku Malut, perbankan harus mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi dengan cara manajemen memiliki filosofi dan gaya operasi yang cukup menunjukkan tindakan kreatif dan membuat dokumen pemberian kredit yang telah bernomor urut dan telah tercetak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin dan Francis Tantri. 2014. **Bank dan Lembaga Keuangan**. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Africaniswara, Elok Izza. 2010. **Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kredit Investasi pada PT. Bank Mandiri**. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Ahmad, Amirah. 2013. **Tinjauan Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian rian Kredit Pada PT Bank Mega Cabang Makassar**. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Fahmi Irham. 2014. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi**. Bandung:ALFABETA.
- Henri. 2013. **Setiap Auditor Harus Baca Buku Ini**. Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kasmir. 2015. **Manajemen Perbankan**. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Mayangsari Sekar and Puspa Wandanarum. 2013. **Auditing Pendekatan Sektor Publik dan Privat**. Jakarta:Media Bangsa.
- Pribowo, Akbar.2007. **Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Kredit Investasi pada PT. Bank nasional Indonesia 46 (Persero) cabang Asia-Afrika-Bandung**. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Ramadhani Rizky. 2016. **Peran Audit Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Kredit Investasi Pada Pt. Bank Bukopin Tbk. Cabang Parepare**. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Sunyoto Danang. 2014. **Auditing Pemeriksa Akuntansi**. Yogyakarta:CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Ade Sanjaya. 2015. **Pengertian Audit Internal**. Internal [Http://landasabteori.com/2015/10/pengertian-audit-internal.html?m=1](http://landasabteori.com/2015/10/pengertian-audit-internal.html?m=1). (Diakses tanggal 23 maret 2017).
- Dhista. 2015. **Persyaratan dan Pengertian Kredit Investasi**. <http://invest.any.web.id/keuangan/persyaratan-dan-pengertian-kredit-investasi.html?m=1>. (Diakses tanggal 25 maret 2017).



[Http://Cumicumaminan.blogspot.co.id/2012/04/prosedur-audit-bidan\\_perkreditan.html?m=1](http://Cumicumaminan.blogspot.co.id/2012/04/prosedur-audit-bidan_perkreditan.html?m=1). (Diakses tanggal 23 maret 2017).

[Http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/11/wewenang-dan-tanggung-jawab-internal.html](http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/11/wewenang-dan-tanggung-jawab-internal.html). (Diakses tanggal 10 maret 2017)

Iskandar David. 2012. **Kontrol Intern Kredit**. <http://belajarperbankan.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-pengendalian-intern-kredit.html>. (Diakses tanggal 26 maret 2017).

Mariani. 2012. **Proses Audit Internal**. <http://Anhyfreedom.blogspot.co.id/2012/10/proses-audit-internal.html?m=1>. (Diakses tanggal 19 April 2017).

Putera Gembala. 2013. **Pengertian Efektivitas dan Efisiensi**. <http://antarberita.blogspot.co.id/2013/09/pengertian-efektivitas-dan-efisiensi.html?m=1>. (Diakses tanggal 25 maret 2017)

Susan Dwi Anggriani. 2014. **Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori efektivitas**. <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1>. (Diakses tanggal 10 maret 2017)

Tunggal Amin Widjaja. 2013. **Pokok-pokok COSO-BASED Auditing**. Jakarta:Harvarindo.

Yan Ahmad. 2012. **Audit Internal**. <http://yaan-achmad.blogspot.co.id/2012/04/auditor.html?m=1>. (diakses tanggal 19 April 2017).

Yonas Muanley. 2016. **Pengertian Efektivitas**. <http://teoriefektivitas.blogspot.co.id/2016/02/pengertianefektivitas.html?m=1>. (Diakses tanggal 23 maret 2017).